

# SELAYANG PANDANG



**BIRO PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI  
PEMBANGUNAN**

**SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
TAHUN 2023**

## **KATA PENGANTAR**

Buku ini disusun untuk memberikan gambaran singkat mengenai Perekonomian Nusa Tenggara Timur dalam mendukung Pembangunan Bidang Perekonomian di Nusa Tenggara Timur Tahun 2023.

Kami berharap Buku ini dapat memberikan bahan masukan dalam penyusunan program dan kegiatan ke depan serta penyusunan rencana strategis berikutnya dan kebijakan lainnya sebagai upaya pencapaian Visi dan Misi Nusa Tenggara Timur.

Sebagai bahan informasi, tentunya buku ini masih jauh dari sempurna, sehingga kritik dan masukan yang berharga sangat kami butuhkan.

Terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu hingga buku ini dapat kami selesaikan pada waktunya dan semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
BAB I .....	1
GAMBARAN UMUM NUSA TENGGARA TIMUR.....	1
1.1 Kondisi Geografi Daerah .....	1
1.2 Kependudukan .....	4
1.3 Ketenagakerjaan .....	5
BAB II .....	7
GAMBARAN PEREKONOMIAN NUSA TENGGARA TIMUR.....	7
2.1 Kondisi Ekonomi.....	7
2.2 Kemampuan Ekonomi Daerah .....	8
2.3 Kondisi Ekonomi Makro Provinsi Nusa Tenggara Timur .....	9
2.4 Indikator, Tujuan dan Sasaran RPD Nusa Tenggara Timur 2024-2026 .....	14
2.5 Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2024-2026 .....	17
BAB III .....	18
POTENSI LINGKUP .....	18
BIRO ADMINISTRASI PEREKONOMIAN .....	18
3.1 Urusan Penanaman Modal .....	18
3.2 Urusan Perindustrian dan Perdagangan .....	20
3.3 Urusan Koperasi dan UMKM .....	29
3.4 Urusan Pariwisata .....	30
3.5 Urusan Perhubungan .....	31
3.6 Urusan Pengelolaan Sumber Daya Air .....	37
3.7 Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral .....	38
3.8 Urusan Badan Usaha Milik Daerah (BUM) dan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).....	39

<b>BAB IV .....</b>	<b>74</b>
<b>GAMBARAN KEGIATAN BIRO ADMINISTRASI PEREKONOMIAN .....</b>	<b>74</b>
<b>4.1 Umum .....</b>	<b>74</b>
1.    Visi dan Misi .....	74
2.    Tugas, Pokok dan Fungsi (Tupoksi) .....	75
<b>4.2 Program dan Kegiatan .....</b>	<b>80</b>
<b>4.2 Produk Hukum yang di hasailkan .....</b>	<b>83</b>

## BAB I

### GAMBARAN UMUM NUSA TENGGARA TIMUR

#### 1.1 KONDISI GEOGRAFI DAERAH NTT



Sumber : Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur

**Nusa Tenggara Timur** (disingkat **NTT**) adalah sebuah Provinsi di Indonesia yang meliputi bagian timur Kepulauan Nusa Tenggara yang mempunyai 1.192 pulau, di mana 600 pulau mempunyai nama, 9 pulau masih diusulkan namanya dan 44 pulau berpenghuni. Provinsi Nusa Tenggara Timur memiliki Ibu Kota di Kota Kupang dengan jumlah penduduk 466.632 jiwa (Bps Provinsi NTT 2023).

Berdasarkan wilayah administrasi Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) letak Geografis Terletak pada 80-120 LS dan 1180– 1250 BT; Luas wilayah daratan NTT adalah seluas 46.446,64 Km<sup>2</sup> dengan batas-batas daerah terdiri atas:

- Wilayah Utara berbatasan dengan Laut Flores;
- Wilayah Timur berbatasan dengan Negara Timor Leste;
- Wilayah Barat berbatasan dengan Provinsi Nusa Tenggara Barat;
- Wilayah Selatan berbatasan dengan Samudera Hindia.

Berdasarkan letak geografisnya, Kepulauan NTT berada diantara Benua Asia dan Benua Australia, serta diantara Samudera Indonesia dan Laut Flores.

Wilayah NTT memiliki panjang total jalan yakni 2153.28 km dan terdiri dari 21 kabupaten dan 1 Kota yang terletak di tujuh pulau besar, yaitu:

- Pulau Sumba : Sumba Barat, Sumba Timur, Sumba Barat Daya, dan Sumba Tengah
- Pulau Timor : Kupang, Timor Tengah Selatan, Timor Tengah Utara, Belu, Kota Kupang
- Pulau Flores : Flores Timur, Sikka, Ende, Ngada, Nagekeo, Manggarai, Manggarai Barat, Manggarai Timur
- Pulau Alor : Alor
- Pulau Lembata : Lembata
- Pulau Rote : Rote Ndao
- Pulau Sabu : Sabu

Wilayah di NTT memiliki suhu yang bervariasi. Dari 10 stasiun meteorologi dan klimatologi di NTT, tercatat suhu tertinggi pada tahun 2023 adalah 32,8<sup>0</sup> C dan terendah adalah 15,8<sup>0</sup> C. Secara umum daerah NTT tergolong panas dengan rata-rata suhu antara 27–28<sup>0</sup> C.



**Luas Daerah, Nama Ibu Kota Kabupaten/Kota  
Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur**

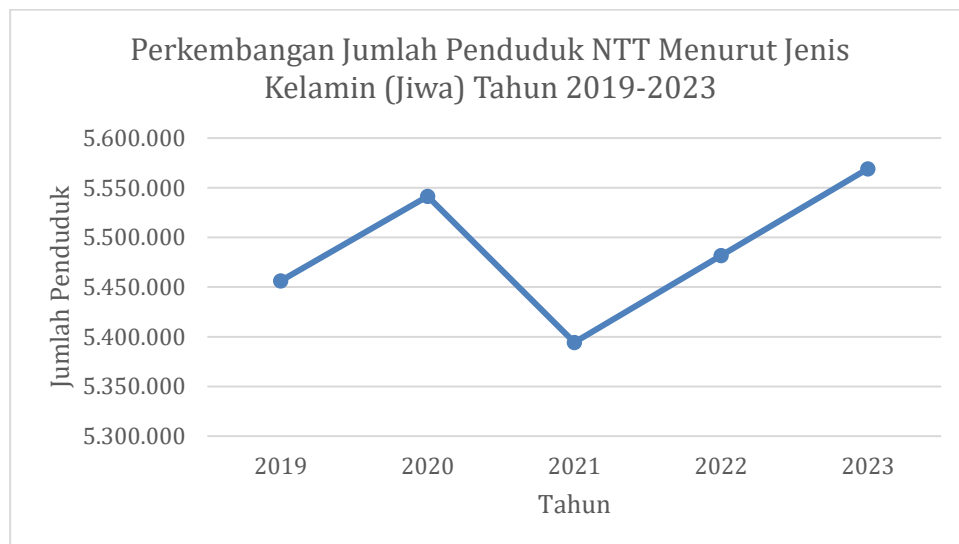
No.	Kabupaten/Kota	Ibu Kota Kabupaten/Kota	Luas (Km <sup>2</sup> )
1	Sumba Barat	Waikabubak	757,41
2	Sumba Timur	Waingapu	6.984,01
3	Kupang	Oelamasi	5.136,51
4	Timor Tengah Selatan	Soe	3.933,15
5	Timor Tengah Utara	Kefamenanu	2.623,20
6	Belu	Atambua	1.127,25
7	Alor	Kalabahi	2.928,56
8	Lembata	Lewoleba	1.268,11
9	Flores Timur	Larantuka	1.748,52
10	Sikka	Maumere	1.671,65
11	Ende	Ende	2.085,24
12	Ngada	Bajawa	1.735,64
13	Manggarai	Ruteng	1.343,83
14	Rote Ndao	Ba'a	1.286,45
15	Manggarai Barat	Labuan Bajo	3.129,00
16	Sumba Tengah	Waibakul	1.789,66
17	Sumba Barat Daya	Tambolaka	1.383,31
18	Nagekeo	Mbay	1.396,16
19	Manggarai Timur	Borong	2.389,53
20	Sabu Raijua	Seba	460,96
21	Malaka	Betun	1.109,16
22	Kota Kupang	Kupang	159,33
<b>NTT</b>			<b>46.446,64</b>

Sumber : BPS Provinsi Nusa Tenggara Timur

Luas wilayah daratan NTT sebesar **46.446,64** km<sup>2</sup>. Kabupaten Sumba Timur dan Kabupaten Kupang merupakan wilayah dengan luas yang paling besar yakni seluas 6.984,01 km<sup>2</sup> dan 5.136,51 km<sup>2</sup>. Sementara wilayah dengan luasan terkecil adalah Kota Kupang dan Kabupaten Sabu Raijua seluas 159,33 km<sup>2</sup> dan 460,96 km<sup>2</sup>.

## 1.2 KEPENDUDUKAN

Pada tahun 2021 Jumlah Penduduk Nusa Tenggara Timur (NTT) mencapai 5.394.380 jiwa, Tahun 2022 mencapai 5.481.790 jiwa. Pada Tahun 2023 tumbuh mencapai 5.569.068 jiwa.



Sumber : BPS Provinsi Nusa Tenggara Timur



### **1.3 KETENAGAKERJAAN**

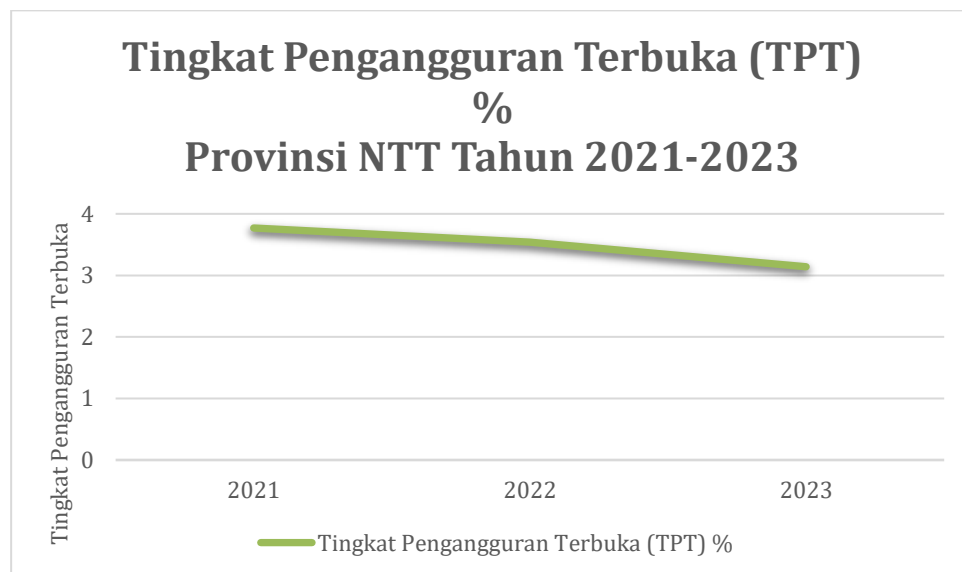
Keadaan ketenagakerjaan di Provinsi Nusa Tenggara Timur pada tahun 2023 ditandai dengan adanya penurunan jumlah angkatan kerja, serta penurunan tingkat pengangguran. Pada tahun 2023 jumlah angkatan kerja mencapai 2.990.716 orang, menurun 31.705 jiwa dibandingkan keadaan Tahun 2022 yang mengalami peningkatan 3.022.421 orang.

Penduduk yang bekerja sebanyak 2.896.901 orang, menurun sebanyak 18.392 orang dibandingkan Tahun 2022 dengan jumlah penduduk bekerja 2.915.293 orang. Di sisi lain, jumlah pengangguran dalam kurun waktu dua tahun terakhir mengalami penurunan. Pada Tahun 2023 terjadi penurunan sebesar 13.313 yaitu dari 107.128 orang pada Tahun 2022 menjadi 93.815 orang pada Tahun 2023. Kemudian Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Provinsi NTT pada Tahun 2023 menurun sekitar 0,4 persen dibandingkan Tahun 2022, yaitu 3,54 persen menjadi 3,14 persen. Selain jumlah pengangguran, penduduk yang termasuk kategori setengah penganggur di Provinsi NTT juga mengalami penurunan dari 1.386.461 orang pada Tahun 2022 menjadi 1.384.704 orang di Tahun 2023. Sementara mereka yang termasuk kategori pekerja paruh waktu mengalami penurunan selama kurun waktu 2 tahun terakhir, yaitu dari 1.114.012 orang pada Tahun 2021 menjadi 1.073.899 orang pada Tahun 2023. Tabel dibawah ini memperlihatkan perkembangan jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas menurut jenis kegiatan.

**Penduduk Provinsi Nusa Tenggara Timur Usia 15 Tahun ke Atas Menurut Kegiatan Tahun 2021-2023**

No.	Kegiatan Utama	Tahun		
		2021	2022	2023
	Total Penduduk Berumur 15 tahun ke Atas	3.955.577	4.017.390	3.949.818
1	Angkatan Kerja	2.918.548	3.022.421	2.990.716
	Bekerja	2.808.620	2.915.293	2.896.901
	Pengangguran	109.928	107.128	93.815
2	Bukan Angkatan Kerja	1.037.029	994.969	959.102
3	Setengah Penganggur Terpaksa	398.659	364.493	310.805
4	Setengah Penganggur Sukarela	1.114.012	1.021.968	1.073.899
	Total Setengah Penganggur	1.512.671	1.386.461	1.384.704
5	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) %	3,77	3,54	3,14
6	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)%	73,78	75,23	75,72

*Sumber: BPS Provinsi NTT*



*Sumber: BPS Provinsi Nusa Tenggara Timur*

## BAB II

### GAMBARAN PEREKONOMIAN NUSA TENGGARA TIMUR

#### 2.1 KONDISI EKONOMI

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah komposit yang mencakup tiga bidang pembangunan manusia yang dianggap paling mendasar dilihat dari kualitas fisik dan non fisik yang meliputi indeks pendidikan, indeks kesehatan, dan indeks ekonomi. Indeks pendidikan dilihat dari rata-rata lama sekolah dan angka melek huruf, Indeks kesehatan dilihat dari angka harapan hidup, dan Indeks ekonomi dilihat dari paritas daya beli atau kemampuan daya beli masyarakat.

#### Capaian Indikator Makro Pembangunan Provinsi NTT Tahun 2021-2023

No.	INDIKATOR	Satuan	TAHUN		
			2021	2022	2023
1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) :	Poin	65,28	65,90	68,4
	a. Indeks Kesehatan (IK)	Poin	67,15	67,47	71,57
	b. Indeks Pendidikan (IP)	Poin	7,69	7,70	7,82
	c. Indeks Daya Beli (IDB)	Poin	7.554.000	7.877.000	8.248.000
2	Jumlah Penduduk	Jiwa	5.394.380	5.481.790	5.569.068
3	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)				
	a. Nilai PDRB				
	1) Atas Dasar Harga Berlaku (adhb)	Triliun	110,89	118,72	128,53
	2) Atas Dasar Harga Konstan (adhk)	Triliun	70,54	72,70	75,26
	b. PDRB per Kapita				
	1) PDRB per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku (adhb)	Ribu	20.555	21.657	23.078
	2) PDRB per Kapita Atas Dasar Harga Konstan (adhk)	Ribu	36.846	37.399	38.169
4	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	%	2,51	3,05	3,52
5	Inflasi	%	1,67	6,65	2,42
6	Kemiskinan	Poin	0,339	0,340	0,325

Sumber : BPS Provinsi NTT

Pemerataan Ekonomi di Nusa Tenggara Timur tidak terlepas dari perkembangan laju pertumbuhan ekonomi, inflasi, PDRB per kapita, dan indeks gini. Laju pertumbuhan Ekonomi di Nusa Tenggara Timur dalam kurun waktu Tahun 2021-2023 mengalami peningkatan sebesar 1,01%, diikuti dengan naiknya inflasi dari tahun 2021 ke tahun 2022. Secara umum produktivitas ekonomi Nusa Tenggara Timur meningkat dan berdampak pada peningkatan PDRB per Kapita (ADHB) Tahun 2023 sebesar Rp 23 Juta.

## 2.2 KEMAMPUAN EKONOMI DAERAH

Struktur Ekonomi NTT pada tahun 2023 masih didominasi oleh lapangan usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan dengan kontribusi sebesar 29,32 persen. Sedangkan dari sisi pengeluaran masih didominasi Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga yaitu sebesar 67,48 persen (BPS NTT, 2023), sehingga ketiga sektor tersebut mencerminkan potensi perekonomian daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Nusa Tenggara Timur secara berkelanjutan.

Perkembangan PDRB Nusa Tenggara Timur Tahun 2022-2023

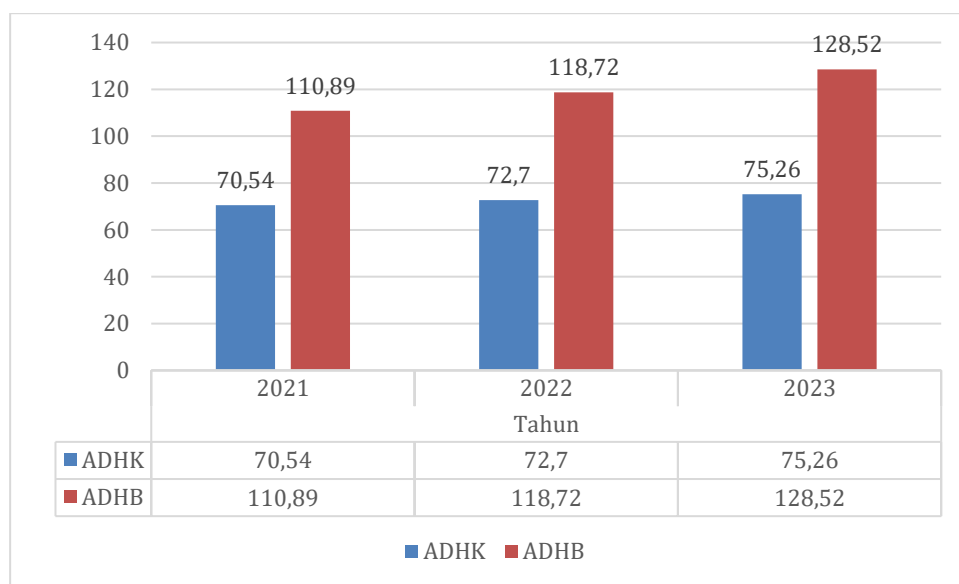
		Kondisi/Capaian	
Indikator	Satuan	2022	2023
<b>a. Kontribusi</b>			
1. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	persen	1,05	0,69
2. Pertambangan dan Penggalian	persen	0,02	0,04
3. Industri Pengolahan	persen	0,08	0,09
4. Pengadaan Listrik dan Gas	persen	0,01	0,01
5. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	persen	0	0
6. Konstruksi	persen	-0,07	0,82
7. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	persen	0,82	0,67
8. Transportasi dan Pergudangan	persen	0,22	0,17
9. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	persen	0,1	0,07
10. Informasi dan Komunikasi	persen	0,44	0,31
11. Jasa Keuangan dan Asuransi	persen	0,05	0,08
12. Real Estat	persen	0,07	0,05
13. Jasa Perusahaan	persen	0	0
14. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	persen	0,25	0,13
15. Jasa Pendidikan	persen	-0,04	0,21
16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	persen	0,03	0,1
17. Jasa Lainnya	persen	0,01	0,07
<b>Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)</b>	<b>persen</b>	<b>3,05</b>	<b>3,52</b>
<b>b. Pertumbuhan</b>			
1. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	persen	3,77	2,46
2. Pertambangan dan Penggalian	persen	2,1	3,65
3. Industri Pengolahan	persen	6,67	7,33
4. Pengadaan Listrik dan Gas	persen	6,16	12,15
5. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	persen	2,01	2,46
6. Konstruksi	persen	-0,67	8,16
7. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	persen	7,08	5,5
8. Transportasi dan Pergudangan	persen	4,74	3,66
9. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	persen	18,4	10,71
10. Informasi dan Komunikasi	persen	4,46	3,1
11. Jasa Keuangan dan Asuransi	persen	1,26	1,87
12. Real Estat	persen	3	2,3
13. Jasa Perusahaan	persen	3,47	3,4
14. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	persen	1,91	1
15. Jasa Pendidikan	persen	-0,52	2,66
16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	persen	1	4,06
17. Jasa Lainnya	persen	0,52	4,3
<b>Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)</b>	<b>persen</b>	<b>3,05</b>	<b>3,52</b>

Sumber : BPS Provinsi Nusa Tenggara Timur

## 2.3 KONDISI EKONOMI MAKRO PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

Stabilitas Makro Ekonomi Nusa Tenggara Timur pada Tahun 2023 dapat terjaga. Perekonomian Nusa Tenggara Timur pada Tahun 2023 yang ditunjukkan dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) tumbuh sebesar 3,52 persen dibandingkan Tahun 2022.

Dari sisi lapangan usaha, pertumbuhan ekonomi tertinggi dicapai oleh lapangan Pengadaan Listrik dan Gas yaitu sebesar 12,15 persen. Sedangkan dari sisi pengeluaran, Komponen Ekspor Barang dan Jasa mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 20,09 persen.



Sumber : BPS Provinsi Nusa Tenggara Timur

Nilai PDRB Nusa Tenggara Timur atas dasar harga berlaku pada tahun 2023 mencapai Rp 128,52 triliun, naik Rp 9,8 triliun dibandingkan tahun 2022 (Rp 118,52 triliun). Bila dilihat berdasarkan harga konstan 2010, PDRB tahun 2023 naik sebesar Rp 2,56 triliun, yaitu dari Rp 72,7 triliun pada tahun 2022 menjadi Rp 75,26 triliun pada tahun 2023.

Sektor Konstruksi memberikan kontribusi terhadap total pertumbuhan PDRB, dengan sumber pertumbuhan sebesar 0,82%, selanjutnya diikuti oleh sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, serta Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor yang memberikan sumber pertumbuhan masing-masing 0,69% dan 67%.

**Nilai PDRB Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku dan Harga Konstan Tahun 2010 (Miliar Rupiah)  
Laju Pertumbuhan PDRB Menurut Lapangan Usaha Tahun Dasar 2010 (persen)**

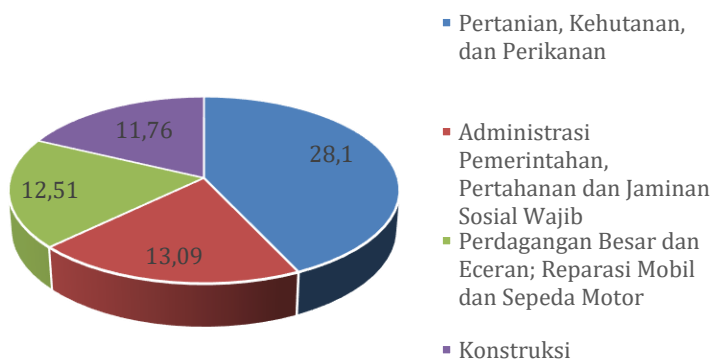
Lapanagn Usaha	Atas Dasar Harga Berlaku			Atas Dasar Harga Konstan 2010			Laju Pertum- buhan 2023 (persen)	Sumber Pertum- buhan 2023 (persen)
	2021	2022	2023	2021	2022	2023		
1. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	32.343	35.136	37.677	19.599	20.342	20.842	2,46	0,69
2. Pertambangan dan Penggalian	1.189	1.253	1.344	829	846	877	3,65	0,04
3. Industri Pengolahan	1.313	1.434	1.688	823	878	942	7,33	0,09
4. Pengadaan Listrik dan Gas	91	101	117	61	65	73	12,15	0,01
5. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	68	70	72	53	55	56	2,46	0
6. Konstruksi	11.485	12.113	13.562	7.311	7.262	7.855	8,16	0,82
7. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	12.724	14.300	16.091	8.217	8.798	9.283	5,5	0,67
8. Transportasi dan Pergudangan	5.059	5.747	6.515	3.282	3.438	3.563	3,66	0,17
9. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	641	741	852	400	473	524	10,71	0,07
10. Informasi dan Komunikasi	8.222	8.641	8.966	7.041	7.354	7.582	3,1	0,31
11. Jasa Keuangan dan Asuransi	4.947	5.383	5.607	2.976	3.013	3.069	1,87	0,08
12. Real Estat	2.467	2.757	3.057	1.681	1.731	1.771	2,3	0,05
13. Jasa Perusahaan	165	179	191	94	97	101	3,4	0
14. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	14.866	15.219	15.944	9.268	9.445	9.540	1	0,13
15. Jasa Pendidikan	10.599	10.765	11.442	5.890	5.859	6.015	2,66	0,21
16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	2.864	2.897	3.274	1.780	1.798	1.871	4,06	0,1
17. Jasa Lainnya	1.870	1.983	2.125	1.233	1.239	1.293	4,3	0,07
<b>Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)</b>	<b>110.886</b>	<b>118.781</b>	<b>128.523</b>	<b>70.538</b>	<b>72.695</b>	<b>75.258</b>	<b>3,52</b>	<b>3,52</b>

Sumber : BPS Provinsi Nusa Tenggara Timur

**STRUKTUR PDRB MENURUT LAPANAGAN USAHA**

Lapangan Usaha	2021	2022	2023
1. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	29,17	29,6	28,1
2. Pertambangan dan Penggalan	1,07	1,06	1,02
3. Industri Pengolahan	1,18	1,21	1,32
4. Pengadaan Listrik dan Gas	0,08	0,09	0,09
5. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,06	0,06	0,06
6. Konstruksi	10,36	10,2	11,76
7. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	11,48	12,05	12,51
8. Transportasi dan Pergudangan	4,56	4,84	4,95
9. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,55	0,62	0,65
10. Informasi dan Komunikasi	7,41	7,28	6,66
11. Jasa Keuangan dan Asuransi	4,46	4,53	4,09
12. Real Estat	2,23	2,23	2,33
13. Jasa Perusahaan	0,15	0,15	0,14
14. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	13,41	12,82	13,09
15. Jasa Pendidikan	9,56	9,07	9,06
16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	2,58	2,44	2,57
17. Jasa Lainnya	1,69	1,67	1,58
<b>Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

Sumber : BPS Provinsi Nusa Tenggara Timur



**Struktur PDRB  
Nusa Tenggara Timur  
Tahun 2023 menurut  
Lapangan Usaha  
Tahun 2023**



**Nilai PDRB Menurut Pengeluaran Atas Dasar Harga Berlaku dan Harga Konstan Tahun 2010 (Miliar Rupiah)**  
**Laju Pertumbuhan PDRB Menurut Pengeluaran Tahun Dasar 2010 (persen)**

Lapanagn Usaha	Atas Dasar Harga Berlaku			Atas Dasar Harga Konstan			Sumber Pertumbuhan 2023 (persen)	Sumber Pertumbuhan 2023 (persen)
	2021	2022	2023	2021	2022	2023		
1. Pengeluaran Konsumsi RumahTangga	77.165	83.610	86.723	53.208	54.675	55.905	1,47	2,08
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	3.744	3.946	4.383	2.598	2.677	2.845	0,12	0,18
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	27.185	26.801	27.435	16.138	15.148	15.253	-1,63	-0,55
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	51.636	54.078	59.072	32.474	32.305	34.368	-0,03	-0,24
5. Perubahan Inventori	1.148	1.149	1.113	656	655	633		
6. Ekspor Barang dan Jasa	6.055	6.803	8.368	3.426	3.757	4.512	-1,16	0,47
7. Dikurangi Impor Barang dan Jasa	56.048	57.668	58.569	37.961	36.522	38.258	-4,75	-1,11
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)	110.886	118.718	128.523	70.538	72.695	75.258	3,45	3,05

Sumber : BPS Provinsi Nusa Tenggara Timur

**Struktur PDRB ADHB Menurut Pengeluaran 2021-2023**

Komponen	2021	2022	2023
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	69,59	70,43	67,48
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	3,38	3,32	3,41
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	24,52	22,57	21,35
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	46,57	45,55	45,96
5. Perubahan Inventori	1,04	0,97	0,87
6. Ekspor Barang dan Jasa	5,46	5,73	6,51
7. Dikurangi Impor Barang dan Jasa	50,55	48,58	45,58
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)	100	100	100

Sumber : BPS Provinsi Nusa Tenggara Timur

Inflasi Bulanan (*Month-to-month/MtM*) Gabungan 3 Kota Inflasi di Nusa Tenggara Timur pada Desember 2022 mengalami Inflasi sebesar 0,81 persen atau terjadi kenaikan Indeks Harga Konsumen (IHK) dari 111,89 pada Bulan November 2022 menjadi 112,80 pada Bulan Desember 2022. Inflasi ini disebabkan oleh kenaikan indeks harga pada 6 dari 11 kelompok pengeluaran. Untuk Inflasi tahun ke tahun (*Year-on-year/YoY*) Gabungan 3 Kota Inflasi di NTT Desember 2022 adalah sebesar 6,65 persen atau terjadi kenaikan IHK dari 105,76 pada Desember 2021 menjadi 112,80 pada Desember 2022.

Untuk Inflasi MtM, kelompok pengeluaran yang mengalami kenaikan indeks harga terbesar adalah kelompok makanan, minuman, dan tembakau yang naik sebesar 0,27 persen, diikuti oleh naiknya indeks harga kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 0,24 persen. Sedangkan untuk Inflasi YoY, kelompok pengeluaran yang mengalami kenaikan terbesar adalah kelompok transportasi sebesar 21,52 persen diikuti kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 7,92 persen.

Inflasi Bulanan (*Month-to-month/MtM*) Gabungan 3 Kota Inflasi di Nusa Tenggara Timur pada September 2023 mengalami Deflasi sebesar 0,08 persen atau terjadi penurunan Indeks Harga Konsumen (IHK) dari 114,26 pada Bulan Agustus 2023 menjadi 114,17 pada Bulan September 2023. Deflasi ini disebabkan oleh penurunan indeks harga pada 6 dari 11 kelompok pengeluaran. Untuk Inflasi tahun ke tahun (*Year-on-year/YoY*) Gabungan 3 Kota Inflasi di NTT September 2023 adalah sebesar 2,19 persen atau terjadi kenaikan IHK dari 111,72 pada September 2022 menjadi 114,17 pada September 2023.

Untuk Inflasi MtM, kelompok pengeluaran yang mengalami penurunan indeks harga terbesar adalah kelompok transportasi yang turun sebesar -0,40 persen, diikuti oleh turunnya indeks harga kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar -0,15 persen. Sedangkan untuk Inflasi YoY, kelompok pengeluaran yang mengalami kenaikan terbesar adalah kelompok makanan, minuman, dan tembakau sebesar 4,03 persen diikuti kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 3,04 persen.

### Produk Domestik Regional Bruto Tahun 2022-2023

No.	INDIKATOR	Satuan	TAHUN	
			2022	2023
1	<b>Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)</b>			
	a. Nilai PDRB			
	1) Atas Dasar Harga Berlaku (adhb)	Triliun	118,72	128,52
	2) Atas Dasar Harga Konstan (adhk)	Triliun	72,7	75,26
	b. PDRB per Kapita			
	1) PDRB per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku (adhb)	Ribu	21.657	23.078
	2) PDRB per Kapita Atas Dasar Harga Konstan (adhk)	Ribu	37.399	38.169
2	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	%	3,05	3,52
3	Inflasi	%	6,65	2,42
4	Indeks Gini	Poin	0,340	0,325

Sumber : BPS Provinsi Nusa Tenggara Timur

## 2.4 INDIKATOR, TUJUAN DAN SASARAN RPD NUSA TENGGARA TIMUR 2024-2026

Visi Pembangunan Jangka Panjang Nusa Tenggara Timur 2005-2025, yaitu :

**“NUSA TENGGARA TIMUR YANG MAJU, MANDIRI, ADIL DAN MAKMUR DALAM BINGKAI NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA”**

### Indikator, Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Daerah

Tujuan	Sasaran	Indikator	Baseline Tahun 2021	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Kondisi pada akhir tahun Perencanaan
1. Mewujudkan masyarakat yang mandiri, makmur, sejahtera dan berkeadilan sosial	1. Meningkatkan produksi dan produktifitas serta pengolahan produk untuk meningkatkan nilai tambah	Pertumbuhan PDRB (%)	2,51	3,1	4,55-5,35	4,75-5,65	5.15-6,01
	2. Meningkatkan peranan pariwisata untuk mendukung perekonomian	Kontribusi pariwisata pada PDRB (%)	6,46	7,59	7,77	7,79	7,79
		Nilai Tambah Ekonomi Kreatif (Rp. Juta)	70.538,34	80.758,35	85.119,30	89.715,74	89.715,74
	3. Meningkatkan investasi dan neraca perdagangan	Realisasi Nilai investasi (Rp. Triliun)	5,1	5,3	5,7	6,2	17,2
		Neraca perdagangan (Rp Triliun)	-33,88	-26,78	-27,64	-23,05	-23.05
	4. Terciptanya lapangan kerja dan meningkatnya kesempatan kerja	Tingkat Pengangguran terbuka (%)	3,77	2,66 - 3,37	2,51-2,35	2,25-2,05	2,25-2,05
	5. Meningkatkan daya beli masyarakat	Pengeluaran per kapita (Rp 000)	7.554	7.598	7.762	7.954	7.954
		Inflasi	2,91	3,5 ± 1	3,5 ± 1	3,5 ± 1	3,5 ± 1
	6. Menurunnya kemiskinan masyarakat	Persentase Penduduk di bawah garis kemiskinan (%)	20,99	20-19,63	19,35-18,85	18,50-17,03	18,50-17,03
	7. Menurunkan ketimpangan pendapatan antar kelompok masyarakat	Indeks Gini (Poin)	0,339	0,336-0,338	0,337-0,335	0,332-0,330	0,332-0,330

Tujuan	Sasaran	Indikator	Baseline Tahun 2021	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Kondisi pada akhir tahun Perencanaan
	8. Meningkatnya Kontribusi PAD terhadap Pendapatan daerah	Ratio PAD terhadap pendapatan daerah (%)	23,15	24,71	25,8	26,85	26,85
	9. Terjaminnya kesetaraan gender dan perlindungan anak, Disabilitas dan inklusi sosial	Indeks Pembangunan Gender (%)	92,63	93	94	94,56	94,56
	10. Terwujudnya Ketahanan dan Kedaulatan Pangan	Skor Pola Pangan Harapan (SPPH) (Poin)	67,9	68	68,25	68,5	68,5
2. Meningkatkan kualitas SDM yang berdaya saing	1. Meningkatnya akses dan kualitas SDM NTT yang tinggi dan berdaya saing	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) (Poin)	65,28	66,58-66,73	66,65-67	67,02-67,25	67,02-67,25
		Rata-rata lama sekolah (Poin)	7,69	7,75	7,93	8,2	8,2
		Harapan lama sekolah (Poin)	13,2	14,2	14,6	15	15
	2. Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan Kesehatan	Usia Harapan Hidup (Poin)	67,15	67,5	68	69	69
		Prevelensi Stunting (%)	20,1	12-0kt	10-9,5	9-8,5	9-8,5
3. Mewujudkan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana	1. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar	Persentase panjang jalan provinsi dalam kondisi mantap (%)	90	100	100	100	100
		Ratio Elektrifikasi (%)	89,01	93	94	95	95
	2. Meningkatnya kualitas tata ruang dan lingkungan hidup Daerah	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (Poin)	73,29	73,62	73,95	74,28	74,28
	3. Meningkatnya ketangguhan bencana daerah dan Adaptasi terhadap Perubahan Iklim	Indeks Resiko Bencana (Poin)	142,52	140	138	135	135

Tujuan	Sasaran	Indikator	Baseline Tahun 2021	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Kondisi pada akhir tahun Perencanaan
4. Mewujudkan Birokrasi yang Berorientasi pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif dan Kolaboratif	1. Meningkatnya kualitas tatakelola penyelenggaraan pemerintahan yang Berorientasi pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif dan Kolaboratif	Indeks Reformasi Birokrasi (Poin)	61,5	63-64	64-65	65,5-67	65,5-67
		OPINI BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
		Nilai Akuntabilitas Kinerja (Predikat)	NA	A	A	A	A
		Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) (Skor)	2,2	2,3	2,5	2,7	2,7
		Tingkat Keterbukaan Informasi Publik (nilai)	88,38	85	90	95	95
		Indeks Kepuasan Masyarakat (Poin)	NA	85	90	90	90
		Indeks Demokrasi Indonesia (Poin)	NA	82,4	82,5	83	83

Sumber : RPD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026

## 2.5 TANTANGAN DAN PROSPEK PEREKONOMIAN DAERAH TAHUN 2024-2026

Penetapan indikator Kinerja bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah daerah yang ditetapkan sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dijabarkan menjadi Rencana Pembangunan Daerah. Penetapan Indikator Kinerja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026 sebagaimana terlihat pada tabel berikut :

**Target Indikator Makro RPJMN 2020-2024 dengan RPD Provinsi NTT Tahun 2024-2026**

No.	Indikator Makro	RPJMN	RPD 2024-2026		
		2024	2024	2025	2026
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	7,5	4,55-5,65	4,75-5,65	5,15-6,01
2	Tingkat Kemiskinan (%)	12,35	20-19,63	19,35-18,85	18,50-17,03
3	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	2	2,66-3,37	2,51-2,35	2,25-2,05
4	Inflasi (persen)		2,5 ± 1	2,5 ± 1	2,5 ± 1

Sumber : RPD Provinsi NTT Tahun 2024-2026

### Prospek Perekonomian Nusa Tenggara Timur

No	Bidang/Fenomena	Uraian
<b>INTERNAL</b>		
1	Pertanian / pangan	Nusa Tenggara Timur memiliki lahan pertanian yang cukup luas, dengan jumlah petani yang cukup banyak, serta komoditas yang cukup beragam.
2	Energi	Nusa Tenggara Timur memiliki sumber daya alam sumber Energi Baru Terbarukan (EBT) yang cukup banyak.
<b>EKSTERNAL</b>		
1	Kelangkaan Pangan di tingkat global dan nasional	Merupakan peluang bagi pertanian Nusa Tenggara Timur dalam pemasaran produk pertanian dan lahannya.

## BAB III

### POTENSI LINGKUP

#### BIRO ADMINISTRASI PEREKONOMIAN

#### 3.1 URUSAN PENANAMAN MODAL

#### REALISASI INVESTASI PER KABUPATEN/KOTA TAHUN 2023 NUSA TENGGARA TIMUR

KODE	WILAYAH	REALISASI INVESTASI (RP)			JUMLAH TOTAL (RP)	Proyek	%
		TARGET TAHUN 2023	PMA	PMDN			
53.01	Kab. Kupang	1,000,000,000,000	24,633,120,000.00	446,745,600,000.00	471,378,720,000.00	74	47.14
53.02	Kab. Timor Tengah Selatan	150,000,000,000	643,800,000.00	41,559,700,000.00	42,203,500,000.00	125	28.14
53.03	Kab. Timor Tengah Utara	175,000,000,000	658,600,000.00	70,900,200,000.00	71,558,800,000.00	61	40.89
53.04	Kab. Belu	150,000,000,000		46,236,000,000.00	46,236,000,000.00	346	30.82
53.05	Kab. Alor	200,000,000,000	18,760,480,000.00	8,052,700,000.00	26,813,180,000.00	22	13.41
53.06	Kab. Flores Timur	50,000,000,000	3,389,200,000.00	3,729,700,000.00	7,118,900,000.00	17	14.24
53.07	Kab. Sikka	75,000,000,000	4,876,600,000.00	19,353,100,000.00	24,229,700,000.00	85	32.31
53.08	Kab. Ende	150,000,000,000	473,580,760,000.00	10,305,300,000.00	483,886,060,000.00	31	322.59
53.09	Kab. Ngada	100,000,000,000	7,496,200,000.00	19,582,200,000.00	27,078,400,000.00	88	27.08
53.10	Kab. Manggarai	50,000,000,000		84,745,700,000.00	84,745,700,000.00	193	169.49
53.11	Kab. Sumba Timur	100,000,000,000	29,639,960,000.00	576,300,300,000.00	605,940,260,000.00	50	605.94
53.12	Kab. Sumba Barat	100,000,000,000	62,128,920,000.00	34,467,500,000.00	96,596,420,000.00	37	96.60
53.13	Kab. Lembata	120,000,000,000	2,378,360,000.00	10,507,400,000.00	12,885,760,000.00	91	10.74
53.14	Kab. Rote Ndao	150,000,000,000	126,947,000,000.00	30,060,500,000.00	157,007,500,000.00	22	104.67
53.15	Kab. Manggarai Barat	1,200,000,000,000	367,053,320,000.00	980,297,100,000.00	1,347,350,420,000.00	408	112.28
53.16	Kab. Nagekeo	50,000,000,000	4,891,400,000.00	-	4,891,400,000.00	-	9.78
53.17	Kab. Sumba Tengah	50,000,000,000	2,521,920,000.00	-	2,521,920,000.00	-	5.04
53.18	Kab. Sumba Barat Daya	80,000,000,000	60,715,520,000.00	11,378,700,000.00	72,094,220,000.00	34	90.12
53.19	Kab. Manggarai Timur	50,000,000,000	1,789,320,000.00	15,925,000,000.00	17,714,320,000.00	18	35.43
53.20	Kab. Sabu Raijua	10,000,000,000		10,105,200,000.00	10,105,200,000.00	10	101.05
53.21	Kab. Malaka	100,000,000,000		27,750,800,000.00	27,750,800,000.00	17	27.75
53.71	Kota Kupang	1,200,000,000,000	647,414,160,000.00	959,159,300,000.00	1,606,573,460,000.00	621	133.88
	<b>TOTAL NTT</b>	<b>5,310,000,000,000</b>	<b>1,839,518,640,000.00</b>	<b>3,407,162,000,000.00</b>	<b>5,246,680,640,000.00</b>	<b>2.350</b>	<b>98.81</b>

Sumber : Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi

Penerbit : DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROV NTT



**Jumlah Perusahaan PMA DAN PMDN Berdasarkan Laporan Kegiatan Penanaman Modal  
(LKPM) Tahun 2028-2023**

<b>Perusahaan</b>	<b>201 8</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
PMA	127	244	190	139	136	579
PMDN	55	105	220	336	472	1.412
<b>TOTAL</b>	<b>182</b>	<b>349</b>	<b>410</b>	<b>475</b>	<b>608</b>	<b>1.991</b>

*Sumber : Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi*

*Penerbit : DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROV NTT*

## **3.2 URUSAN PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN**

### **FOKUS PEMBANGUNAN INDUSTRI NUSA TENGGRA TIMUR**

## **PETA INDUSTRI UNGGULAN**

## **KAWASAN INDUSTRI**

**Nilai Ekspor Migas dan Nonmigas Nusa Tenggara Timur, Januari-Desember 2023**

Uraian	Nilai FOB (US\$)					Perubahan (%)			Peran Thd Jan-Des 2023(%) )
	Des 2022	Jan-Des 2022	Nov-23	Des 2023	Jan-Des 2023*)	y-on-y	m-to-m	c-to-c	
Migas	209.509	2.067.658	528.076	371.262	2.470.798	7.721	-29,70	19.50	4.11
Non Migas	5.033.409	46.596.604	5.231.866	4.855.171	57.576.670	-3.54	-7.20	23.56	95.89
<b>Total</b>	<b>5.242.918</b>	<b>48.664.263</b>	<b>5.759.942</b>	<b>5.226.433</b>	<b>60.047.468</b>	<b>-0,31</b>	<b>-9.26</b>	<b>23.39</b>	<b>100,00</b>

\*) Angka Sementara

Sumber : BPS Provinsi NTT

**Ringkasan Perkembangan Impor Nusa Tenggara Timur, Januari-Desember 2023**

Uraian	Nilai FOB (US\$)					Perubahan (%)			Peran Thd Jan-Des 2023(%)
	Des 2022	Jan-Des 2022	Nov-23	Des 2023	Jan-Des 2023	y-on-y	m-to-m	c-to-c	
Migas	-	158	-	-	6.854.531	-	-	4.338.210,76	9,75
Non Migas	19.775.710	21.440.419	19.475.749	3.250.193	63.462.949	-83.56	-83,31	196,00	90,25
<b>Total</b>	<b>19.775.710</b>	<b>21.440.577</b>	<b>19.475.749</b>	<b>3.250.193</b>	<b>70.317.480</b>	<b>-83,56</b>	<b>-83,31</b>	<b>227,96</b>	<b>100,00</b>

\*) Angka Sementara

Sumber : BPS Provinsi NTT

**Nilai Ekspor Provinsi Asal Menurut Negara Tujuan, Januari-Desember 2023**

Negara Tujuan	Nilai FOB(USS) 2023		Perubahan		Nilai FOB (USS) Januari-Desember		Perubahan %	Peran Terhadap Total 2024 (%)
	Nov	Des	Nilai	%	2022	2023		
Timor Leste	5.345.374	4.940.990	-404.384	-7,57	89.276.954	57.189.186	-35,94	77,19
Vietnam	2.118.652	1.933.101	-185.551	-8,76	2.568.151	6.309.788	145,69	8,52
Australia	46.479	87.674	41.195	88,63	675.750	505.537	-25,19	0,68
China	250.461	73.160	-177.301	-70,79	3.368.950	2.425.197	-28,01	327
Korea Selatan	20.806	38.050	17.244	82,88	4.795.466	746.531	-84,43	1,01
Singapura	18.885	28.522	9.637	51,03	805.115	307.689	-61,78	0,42
Taiwan	26.253	24.895	-1.358	-5,17	3.081.646	728.629	-76,36	0,98
Amerika Serikat	12.741	24.259	11.518	90,40	1.741.438	922.251	-47,04	1,24
United Kingdom	7	20.605	20.598	292.580	9	169.768	1.804.019,36	0,23
Jepang	797.823	20.489	-777.335	-97,43	1.378.956	2.069.458	50,07	2,79
<b>Total 10 Negara</b>	<b>8.637.481</b>	<b>7.191.744</b>	<b>-1.445.737</b>	<b>-16,74</b>	<b>107.692.436</b>	<b>71.374.035</b>	<b>-33,72</b>	<b>96,34</b>
Lainnya	163.736	37.915	-125.821	-76,84	3.742.023	2.712.310	-27,52	3,66
<b>Total Eskpor</b>	<b>8.801.217</b>	<b>7.229.659</b>	<b>-1.571.558</b>	<b>-17,86</b>	<b>111.434.459</b>	<b>74.086.345</b>	<b>-33,52</b>	<b>100,00</b>

Sumber : BPS Provinsi NTT

**Impor Provinsi NTT Menurut Negara Asal Impor, Januari-Desember 2022 dan 2023**

Negara Asal		Nilai FOB (US\$) 2023		Perubahan		Nilai FOB(US\$) Januari- Desember		Perubaha n (%)	Peran Thd Jan- Des 2023(%)
		November	Desember	Nilai	%	2022	2023		
<b>ASEAN</b>		<b>4.069.749</b>	<b>3.250.193</b>	<b>-819.556</b>	<b>-20,14</b>	<b>1.886.180</b>	<b>43.077.969</b>	<b>2.183.87</b>	<b>67,88</b>
1	Thailand	-	3.073.330	3.073.330	-	-	18.292.830	-	28,82
2	Singapura	-	-	-	-	-	2.448	-	0,00
3	Vietnam	3.965.000	-	-3.965.000	- 100,00	-	22.086.850	-	34,80
4	Indonesia	-	40.335	40.335	-	8.654	61.864	614,86	0,10
5	Timor Leste	104.749	136.528	31.779	30,34	1.877.526	2.633.977	40,29	4,15
ASEAN Lainnya		-	-	-	-	-	-	-	-
<b>NEGARA UTAMA LAINNYA</b>		<b>15.406.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b> <b>15.406.000</b>	<b>-</b> <b>100,00</b>	<b>19.554.239</b>	<b>20.356.000</b>	<b>4,10</b>	<b>32,08</b>
6	India	-	-	-	-	-	-	-	-
7	China	-	-	-	-	3.664.139	-	-100,00	-
8	Korea Selatan	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Australia	15.406.000	-	- 15.406.000	- 100,00	15.890.100	15.406.000	-3,05	24,28
10	Kanada	-	-	-	-	-	4.950.000	-	7,80
<b>TOTAL 10 NEGARA</b>		<b>19.475.749</b>	<b>3.250.193</b>	<b>-</b> <b>16.225.556</b>	<b>-83,31</b>	<b>21.440.419</b>	<b>63.433.969</b>	<b>195,86</b>	<b>99,95</b>
Lainnya		-	-	-	-	-	28.980	-	0,05
<b>TOTAL IMPOR NON MIGAS</b>		<b>19.475.749</b>	<b>3.250.193</b>	<b>-</b> <b>16.225.556</b>	<b>-83,31</b>	<b>21.440.419</b>	<b>63.462.949</b>	<b>196,00</b>	<b>100,00</b>

Sumber : BPS Provinsi  
NTT



**Nilai Ekspor Sepuluh Kelompok Komoditas Non Migas NTT, Januari–Desember 2023**

Kelompok Komoditas	Nilai FOB (US\$) 2023		Perubahan		Nilai FOB(US\$) Januari-Desember		Perubahan (%)	Peran Thd Jan-Des 2023 (%)*)
	Nov	Des	Nilai	%	2022	2023		
Perabot, Penerangan Rumah (94)	513.944	736.449	222.505	4.329	4.546.541	6.007.972	32.14	10.43
Olahan dari Tepung (19)	590.237	481.695	-108.542	-18.39	3.822.051	6.456.807	68.94	1.121
Kendaraan dan Bagiannya (87)	374.410	399.433	25.023	6.68	2.736.927	4.260.505	55.67	7.40
Garam, Belerang, Kapur (25)	451.936	371.361	-80.575	-17.83	2.819.212	4.165.280	47.75	7.23
Minyak Atsiri, Kosmetik Wangi-wangian (33)	352.521	352.730	209	0.06	2.440.550	2.704.453	10.81	4.70
Susu, Mentega, Telur (04)	357.396	293.649	-63.747	-17.84	3.677.159	4.999.267	35.95	8.68
Minuman (22)	381.801	287.026	-94.776	-24.82	5.132.393	3.294.401	-35.81	5.72
Benda-benda dari Besi dan Baja (73)	130.004	200.869	70.865	54.51	687.892	1.259.065	83.03	2.19
Berbagai Makanan Olahan (21)	165.691	159.632	-6.059	-3.66	988.509	2.028.740	105.23	3.52
Plastik dan Barang dari Plastik (39)	100.249	145.287	45.038	44.93	1.246.648	1.539.498	23.49	2.67
<b>Total 10 Kelompok Komoditas</b>	<b>3.418.190</b>	<b>3.428.131</b>	<b>9.942</b>	<b>0.29</b>	<b>28.097.881</b>	<b>36.715.988</b>	<b>30.67</b>	<b>63.77</b>
Lainnya	1.813.676	1.427.039	-386.637	-21.32	18.498.724	20.860.681	12.77	3.623
<b>Total Eskpor Non Migas</b>	<b>5.231.866</b>	<b>4.855.171</b>	<b>-376.695</b>	<b>-7.20</b>	<b>46.596.604</b>	<b>57.576.670</b>	<b>23.56</b>	<b>100.00</b>

Sumber : BPS Provinsi NTT

**Nilai Impor 10 Kelompok Komoditas Non Migas Provinsi Nusa Tenggara Timur  
Januari-Desember 2022 dan 2023**

Uraian	Nilai FOB (US\$) 2023					Perubahan (%)			Peran Thd Jan-Des
	Des 2022	Jan-Des 2022	Nov-23	Des 2023	Jan- Des 2023	y-on-y	m-to-m	c-to-c	2023 (%)
Gandum- gandum (10)	-	-	3.965.000	3.073.330	25.160.180	-	-22,49	-	39,65
Kopi, The, Rempah- rempah (09)	100.593	547.533	46.596	75.750	1.662.018	-24,7	62,57	203,55	2,62
Biji-bijian berminyak (12)	39.950	1.121.962	27.490	47.138	815.290	17,99	71,47	-27,33	1,28
Mesin- mesin/ Pesawat Mekanik (84)	2.046.584	2.047.716	3.150	40.335	61.127	-98,03	1.180.48	-97,01	0,10
Sayuran (07)	36.608	96.211	-	10.400	41.485	-71,59	-	-56,88	0,07
Buah- buahan(08)	2.075	4.632	-	3.240	3.240	56,14	-	-30,05	0,01
Gula dan Kembang Gula (17)	-	15.890.100	15.406.000	-	30.625.500	-	-100,00	92.73	48,26
Benda- benda dari Besi dan Baja (73)	-	322.765	12.317	-	12.744	-	-100,00	-96,05	0,02
Mesin / Peralatan Listik (85)	-	1.301.371	5.858	-	6.635	-	-100,00	-99,49	0,01
Plastik dan Barang dari Plastik (39)	-	-	4.396	-	4.576	-	-100,00	-	0,01
<b>Total 10 Kelompok Komoditas</b>	<b>2.225.810</b>	<b>21.332.290</b>	<b>19.470.807</b>	<b>3.250.193</b>	<b>58.392.795</b>	<b>46,02</b>	<b>-83.31</b>	<b>173.73</b>	<b>92,01</b>
Lainnya	-	91.540	632	-	5.070.154	-	-100,00	5.438.73	7,99
<b>Total Impor Non Migas</b>	<b>2.225.810</b>	<b>21.423.830</b>	<b>19.471.439</b>	<b>3.250.193</b>	<b>63.462.949</b>	<b>46,02</b>	<b>-83,31</b>	<b>196,23</b>	<b>100,00</b>

Sumber : BPS Provinsi NTT

**DAFTAR PASAR TRADISIONAL, TOKO MODERN DAN GUDANG TAHUN 2023**

### 3.3 URUSAN KOPERASI DAN UMKM

Kabupaten/Kota		Koperasi Unit Desa (KUD)		Koperasi Lainnya		Aktif		Tidak Aktif		Total Anggota Koperasi	
		2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023
<b>Kabupaten</b>											
1.	Sumba Barat	4	4	131	131	82	83	53	53	10.424	10.444
2.	Sumba Timur	13	13	136	136	122	122	27	27	21.155	21.155
3.	Kupang	17	17	374	378	371	371	24	24	23.926	23.926
4.	Timor Tengah Selatan	14	14	152	152	152	152	14	14	39.068	39.068
5.	Timor Tengah Utara	13	13	91	91	68	68	36	36	7.748	7.748
6.	Belu	7	7	172	172	71	71	108	108	14.086	14.086
7.	Alor	10	10	178	177	164	164	23	23	18.307	18.307
8.	Lembata	9	9	107	107	95	95	21	21	46.974	46.974
9.	Flores Timur	9	9	197	197	176	176	30	30	74.464	74.464
10.	Sikka	10	10	179	180	133	133	57	57	435.710	435.710
11.	Ende	10	10	177	177	100	100	87	87	47.827	47.827
12.	Ngada	5	5	117	117	115	115	7	7	159.854	159.854
13.	Manggarai	6	6	167	167	169	169	4	4	39.848	39.848
14.	Rote Ndao	11	11	192	192	184	184	19	19	10.859	10.859
15.	Manggarai Barat	5	5	142	142	140	140	7	7	18.531	18.531
16.	Sumba Tengah	3	3	50	50	41	41	12	12	2.841	2.841
17.	Sumba Barat Daya	6	6	146	146	65	66	87	87	18.970	18.990
18.	Nagekeo	10	10	109	105	104	104	11	11	97.792	97.792
19.	Manggarai Timur	6	6	112	112	91	91	27	27	20.374	20.374
20.	Sabu Raijua	1	1	48	48	38	38	11	11	6.516	6.546
21.	Malaka	7	7	82	82	78	78	11	11	14.276	14.276
<b>Kota</b>											
1.	Kota Kupang	2	2	631	631	376	376	257	257	18.338	18.348
Provinsi Nusa Tenggara Timur		-	-	423	423	404	404	19	19	1.345.342	1.345.362
<b>Jumlah/Total</b>		<b>178</b>	<b>178</b>	<b>4113</b>	<b>4113</b>	<b>3339</b>	<b>3343</b>	<b>952</b>	<b>952</b>	<b>2.493.230</b>	<b>2.493.330</b>

Sumber : Provinsi NTT Dalam Angka, BPS

### 3.4 URUSAN PARIWISATA

#### Jumlah Akomodasi dan Jumlah Wisatawan

No.	Nama	Tahun			Keterangan
		2022	2023	2024	
1	Jumlah Tamu Asing dan Domestik Hotel Non Bintang (Jiwa)				Data s.d Juni 2024
	Mancanegara	25.979	81.351	13.801	
	Domestik	332.962	372.127	37.435	
2	Rata-rata Lama Menginap Tamu Asing dan Domestik Hotel Non Bintang (Hari)				
	Mancanegara	2,24	-	1,66	
	Domestik	1,73	-	1,34	
3	Tingkat Penghunian Kamar (TPK) Menurut Jenis Hotel (Persen)				
	Hotel Bintang	39,83	-	44,85	
	Hotel Non Bintang	15,07	-	18,84	
4	Banyaknya Rumah Makan/Restoran	2.747	2.711		
5	Jumlah Daya Tarik Wisata	1.582	1.637		

Sumber : BPS Provinsi NTT

### 3.5 URUSAN PERHUBUNGAN

#### STATUS PELABUHAN

No.	PENETAPAN LOKASI DAN HIERARKI PELABUHAN							KET
	Kabupaten / Kota	No.	Pelabuhan	Hierarki Pelabuhan				
				2017	2022	2027	2037	
XVIII. Provinsi Nusa Tenggara Timur								
213	Alor	1	Baranusa	PR	PR	PR	PR	*
214	Alor	2	Kalabahi	PR	PR	PP	PP	*/TL
215	Alor	3	Maritaing	PL	PL	PL	PL	
216	Alor	4	Moru	PR	PR	PR	PR	
217	Belu	5	Atapupu	PP	PP	PP	PP	*
218	Ende	6	Ende	PP	PP	PP	PP	*
219	Ende	7	Ippi	PP	PP	PP	PP	
220	Ende	8	Maurole	PL	PL	PL	PL	
221	Ende	9	Pulau Ende	PL	PL	PL	PL	
222	Flores Timur	10	Larantuka	PP	PP	PP	PP	*/TL
223	Flores Timur	11	Lamakera	PL	PL	PL	PL	
224	Flores Timur	12	Menanga	PL	PL	PL	PL	
225	Flores Timur	13	Tobilota	PL	PL	PL	PL	
226	Flores Timur	14	T erong/Waiwerang	PR	PR	PP	PP	
227	Flores Timur	15	Waiwadan	PL	PL	PL	PL	
228	Flores Timur	16	Waiwuring	PL	PL	PL	PL	
229	Kupang	17	Oepoli	PL	PL	PR	PR	
230	Kupang	18	Tenau/ Kupang	PU	PU	PU	PU	*
231	Kupang	19	Naikliu	PL	PL	PL	PL	
232	Kupang	20	Nunbaun Sabu (Namosain)	PL	PL	PL	PL	
233	Lembata	21	Balauring	PL	PL	PL	PL	
234	Lembata	22	Lewoleba	PP	PP	PP	PP	TL
235	Lembata	23	Wulandoni	PL	PL	PL	PL	
236	Manggarai	24	Reo	PP	PP	PP	PP	*
237	Manggarai	25	P. Mules	PL	PL	PL	PL	
238	Manggarai Barat	26	Labuan Bajo	PP	PP	PP	PP	*/DW
239	Manggarai Barat	27	Komodo	PL	PL	PL	PL	
240	Manggarai Timur	28	Pota	PL	PL	PL	PL	
241	Manggarai Timur	29	Waiwole	PL	PL	PL	PL	
242	Nagekeo	30	Marapokot	PR	PR	PR	PR	*
243	Ngada	31	Maumbawa	PL	PL	PL	PL	
244	Ngada	32	Riung	PL	PL	PL	PL	
245	Rote Ndao	33	Baa	PL	PL	PR	PR	*
246	Rote Ndao	34	Ndao	PP	PP	PP	PP	TL
247	Rote Ndao	35	Batutua	PL	PL	PL	PL	
248	Rote Ndao	36	Papela	PL	PL	PR	PR	

No.	PENETAPAN LOKASI DAN HIERARKI PELABUHAN							KET
	Kabupaten / Kota	No.	Pelabuhan	Hierarki Pelabuhan				
				2017	2022	2027	2037	
XVIII. Provinsi Nusa Tenggara Timur								
249	Sabu Raijua	37	Seba	PP	PP	PP	PP	*
250	Sabu Raijua	38	Biu	PL	PL	PL	PL	
251	Sabu Raijua	39	Raijua	PL	PL	PR	PR	TL
252	Sikka	40	Maumere /Lorens Say	PP	PP	PP	PP	*
253	Sikka	41	Palue	PL	PL	PL	PL	
254	Sikka	42	Wuring	PL	PL	PR	PR	TL
255	Sumba Barat	43	Binanatu	PL	PL	PL	PL	
256	Sumba Barat Daya	44	Waikelo	PR	PR	PR	PR	*
257	Sumba Tengah	45	Mamboro	PL	PL	PL	PL	
258	Sumba Timur	46	Waingapu	PP	PP	PP	PP	*/TL
259	Sumba Timur	47	Baing	PL	PL	PL	PL	
260	Sumba Timur	48	Pulau Salura	PL	PL	PL	PL	
261	Timor Tengah Selatan	49	Kolbano	PL	PL	PR	PR	
262	Timor Tengah Utara	50	Wini	PP	PP	PP	PP	

Sumber : Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor : KP 432 Tahun 2017 Tentang Rencana Induk Pelabuhan Nasional

Keterangan :

PU : Pelabuhan Utama

PP : Pelabuhan Pengumpul

PR : Pelabuhan Pengumpan Regional

PL : Pelabuhan Pengumpan Lokal

\*) Kantor Pelabuhan

\*\*) Hub Internasional

TL) Tol Laut

DW) Destinasi Wisata

TK) Penetapan Hirarki Berdasarkan Pengawasan Terminal Khusus

- 1) **Terminal Umum** adalah bagian dari pelabuhan yang terletak di dalam atau di luar Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan yang merupakan bagian dari pelabuhan terdekat untuk melayani kepentingan umum yang diselenggarakan oleh Penyelenggara Pelabuhan atau Badan Usaha Pelabuhan yang telah atau akan diberikan hak untuk menyelenggarakan kegiatan penyediaan dan/atau pelayanan jasa kepelabuhan tertentu dalam jangka waktu tertentu dan kompensasi tertentu yang diatur dalam perjanjian konsensi atau bentuk kerjasama lainnya.
- 2) **Rencana Lokasi Pelabuhan** adalah usulan lokasi pelabuhan yang masih memerlukan dokumen perencanaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**LOKASI TERMINAL UMUM (BAGIAN DARI PELABUHAN YANG DAPAT BERUBAH MENGIKUTI PERKEMBANGAN PELABUHAN)**

No.	PENETAPAN LOKASI DAN HIERARKI PELABUHAN			
	Kabupaten / Kota	No.	Terminal Umum	Keterangan
<b>XVIII. Provinsi Nusa Tenggara Timur</b>				
33	Sumba Timur	1	Pelra Waingapu	Pelabuhan Waingapu



**Bandar Udara Provinsi Nusa Tenggara Timur**

Wilayah	Nama Bandara	Jumlah Penumpang 2023	
		Datang	Berangkat
Sumba Barat Daya	Tambolaka	86.556	88.137
Sumba Timur	Umbu Mehang Kunda	42.046	44.673
Sabu Raijua	Terdamu	4.111	4.316
Belu	A. A. Bere Talo	16.880	15.485
Alor	Mali	19.224	19.246
Alor	Kabir	317	446
Lembata	Wunopito	8.722	8.744
Flores Timur	Gewayantana	17.235	17.366
Sikka	Frans Seda	59.729	59.434
Ende	H. Aroeboesman	54.230	54.571
Ngada	Toreleleo	19.043	20.578
Manggarai	Frans Sales Lega	5.288	5.107
Rote Ndao	Lekunik	1.525	1.880
Manggarai Barat	Komodo	442.098	426.509
Kota Kupang	Eltari	647.397	604.855
<b>Jumlah</b>		<b>1.424.401</b>	<b>1.371.347</b>

Sumber : BPS Provinsi NTT

**PETA JALAN PROVINSI**

**PETA FUNGSI JALAN PROVINSI**

**PETA JALAN STRATEGIS PROVINSI RENCANA**

### **3.6 URUSAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR**

### **3.7 URUSAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**

### **3.8 URUSAN BADAN USAHA MILIK DAERAH (BUMD) DAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (BLUD)**

#### **BADAN USAHA MILIK DAERAH (BUMD) TAHUN 2023**

##### **I. PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH NTT (PT BPD NTT)**

###### **➤ Dasar Hukum PT Bank Pembangunan Daerah NTT (PT BPD NTT)**

1. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur mulai melakukan kegiatannya sebagai bank pada tanggal 17 Juli 1962 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan dan Bank Sentral No: BUM 9-13/ II tanggal 5 Februari 1962 tentang Pemberian Izin Usaha kepada PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur, dengan kedudukan tempat usaha di Kupang Ibukota Propinsi Nusa Tenggara Timur.
2. Dalam rangka penyesuaian dengan ketentuan dalam Undang-Undang No.13 Tahun 1962 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Bank Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 No.59, Tambahan Lembaran Negara No.2490),
3. Pemerintah Propinsi Nusa Tenggara Timur menetapkan perubahan status hukum Bank Pembangunan Nusa Tenggara Timur dari Perseroan Terbatas menjadi Perusahaan Daerah melalui Peraturan Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur No.01/pd/DPRD-GR/1963 tanggal 12 Maret 1963.
4. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.1 Tahun 1998 tanggal 4 Februari 1998 tentang Bentuk Badan Hukum Bank Pembangunan Daerah, Bank kembali merubah bentuk badan hukum dari Perusahaan Daerah kembali menjadi Perseroan Terbatas (PT).
5. Perubahan badan hukum Bank ditetapkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur No.3 Tahun 1999 tanggal 26 Maret 1999 tentang Perubahan Bentuk Hukum Bank Pembangunan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur dari Perusahaan Daerah menjadi Perseroan Terbatas yang telah memperoleh pengesahan dari Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia berdasarkan Keputusan No.584.63-345 tanggal 20 April 1999 tentang Pengesahan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur No.3 Tahun 1999 tentang Perubahan Bentuk Hukum Bank Pembangunan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur dari Perusahaan Daerah menjadi Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur .
6. Penyesuaian bentuk hukum Bank menjadi Perseroan Terbatas dinyatakan dalam Akta Notaris No.122 tanggal 22 April 1999 yang dibuat dihadapan Silvester Joseph Mambaitfeto, S.H, yang telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Keputusan No.C2-8228.HT.01.01.TH 99 tanggal 5 Mei 1999 dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.47 tanggal 11 Juni 1999, Tambahan No.3491.  
Untuk memenuhi ketentuan Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas, Anggaran Dasar telah dilakukan penyesuaian melalui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 10 April 2008. Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tersebut dinyatakan dalam akta No.26 tanggal 6 Juni 2008 yang dibuat di

hadapan Emmanuel Mali, S.H, notaris di Kupang dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No.AHU-48098.AH.01.02 Tahun 2008 tanggal 5 Agustus 2008 dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.81 tanggal 7 Oktober 2008 Tambahan No.19417. Pada tahun 1999, Perseroan menjadi salah satu Bank Pembangunan Daerah yang masuk Program Rekapitalisasi Bank Pembangunan Daerah karena mempunyai Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPM) lebih kecil dari 8% (delapan persen).

Dalam rangka pelaksanaan hak opsi (call option), tanggal 18 Desember 2003, dilaksanakan Perjanjian Jual Beli Seluruh Saham Negara dan Pelunasan Obligasi Negara Pada PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur tanggal 30 Juni 2004, Negara Republik Indonesia c.q. Pemerintah Republik Indonesia mengalihkan 46.600 (empat puluh enam ribu enam ratus) saham miliknya dalam Perseroan kepada Pemerintah Propinsi Nusa Tenggara Timur.

Perubahan penting lainnya adalah mengenai perubahan modal dasar Bank dari Rp500.000.000.000 menjadi Rp1.000.000.000.000, yang dinyatakan dalam akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Bank No.73 tanggal 15 November 2010 yang dibuat dihadapan Silvester Joseph Mambaitfeto, S.H., notaris di Kupang. Perubahan tersebut telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No.AHU-18804.AH.01.02. Tahun 2011 tanggal 14 April 2011. Pada bulan Juli 2011, Perseroan menerbitkan obligasi sebesar Rp. 500 miliar dengan suku bunga tetap yang telah digunakan untuk pendanaan jangka panjang dalam rangka ekspansi Perseroan. Perubahan terakhir Anggaran Dasar Bank berdasarkan akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No.8 tanggal 27 Mei 2016 yang dibuat dihadapan Lalu Muhamad Supriandi, S.H., M.Kn, notaris di Labuan Bajo mengenai perubahan modal dasar Bank dari Rp1.000.000.000.000,- menjadi Rp4.000.000.000.000,- . Akta perubahan ini telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan surat No.AHU-0011840.AH.01.02. Tahun 2016 tanggal 22 Juni 2016. Dari perubahan Modal Dasar Perseroan Bank NTT sebagaimana disampaikan di atas, posisi modal yang ditempatkan dan disetor penuh pada akhir Desember 2016 telah mencapai Rp1.081.098.350.000,-- (satu triliun delapan puluh satu miliar sembilan puluh delapan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

7. Upaya manajemen BankNTT dalam mengembangkan usaha bank ini mendapatkan dukungan pemegang saham yaitu Pemerintah Propinsi, Kota/Kabupaten se – NTT yang secara konsisten melakukan tambahan setoran modal dan menempatkan dana – dana Pemerintah Daerah di BankNTT. Pada tanggal 13 November 2017, Bank NTT menerbitkan Surat Berharga “Negotiable Certificate of Deposit I Bank NTT” dengan nominal sebesar Rp.450.000.000.000 (Empat Ratus Lima Puluh Miliar). Pada tanggal 21 Desember 2018, Perseroan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan I Bank NTT Tahap I Tahun 2018 sebesar Rp. 500 miliar dengan suku bunga tetap yang telah digunakan untuk pendanaan jangka panjang dalam rangka ekspansi Perseroan. Perubahan terakhir Anggaran Dasar Bank berdasarkan akta Penyertaan Persetujuan Penambahan Setoran Modal ke dalam PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Nomor 4 tanggal 7 Februari 2022 yang dibuat dihadapan Serlina Sari Dewi Darmawan S.H.M.Kn. notaris di Kupang mengenai perubahan modal dasar Bank dari Rp 4.000.000.000.000,- menjadi Rp 7.000.000.000.000,- akta perubahan ini telah mendapat persetujuan dari menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan keputusan No. AHU-0010766.AH.01,02 tahun 2022 tanggal 12 Februari 2022.



➤ **Core Business PT Bank Pembangunan Daerah NTT (PT BPD NTT)**

Bidang Usaha KEGIATAN USAHA MENURUT ANGGARAN DASAR TERAKHIR Sesuai dengan Anggaran Dasar Perusahaan yang ditetapkan dalam Akta Pendirian Perseroan No. 122 tanggal 22 April 1999 (berdasarkan Pasal 8 ayat (1) dan Pasal 12 UU No.1/1995), Bank NTT bergerak dalam bidang usaha perbankan dengan Kegiatan Usaha Perseroan meliputi :

- a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk Simpanan berupa Giro, Deposito Berjangka, Sertifikat Deposito, Tabungan dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.
- b. Memberi Kredit.
- c. Menerbitkan Surat Pengakuan Hutang.
- d. Membeli, menjual atau menjamin atas risiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya:
  - Surat-surat Wesel termasuk Wesel yang diakseptasi oleh Bank yang masa berlakunya tidak lebih lama dari pada kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud.
  - Surat Pengakuan Hutang dan Kertas Dagang lainnya, yang masa berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud.
  - Kertas Perbendaharaan Negara dan Surat Jaminan Pemerintah.
  - Sertifikat Bank Indonesia (SBI).
  - Obligasi.
  - Surat Dagang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun.
  - Instrumen Surat Berharga lain yang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun.
- e. Memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun kepentingan nasabah.
- f. Menempatkan dana pada, meminjam dana dari, atau meminjamkan dana kepada Bank lain dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel,cek atau sarana lainnya.
- g. Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan atau antar pihak ketiga.
- h. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga.
- i. Melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak.
- j. Melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam bentuk berharga yang tidak tercatat di Bursa Efek.
- k. Membeli melalui pelelangan agunan baik semua maupun sebagian dalam hal debitur tidak memenuhi kewajibannya kepada Bank dengan ketentuan agunan yang dibeli tersebut wajib dicairkan secepatnya.
- l. Melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit dan kegiatan wali amanat.
- m. Melakukan kegiatan dalam Valuta Asing dan/ atau sebagai Bank Devisa dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh yang berwenang.
- n. Melakukan kegiatan penyertaan modal pada Bank atau perusahaan lain di bidang keuangan seperti sewa guna usaha,modal ventura perusahaan efek, asuransi serta lembaga kliring penyelesaian dan penyimpanan dengan memenuhi ketentuan yang di tetapkan oleh yang berwenang.

- o. Melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan kredit, dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh yang berwenang.
- p. Bertindak sebagai pendiri dana pensiun sesuai dengan ketentuan dalam peraturan dana pensiun yang berlaku.
- q. Membantu Pemerintah Daerah dalam membina Bank Perkreditan Rakyat (BPR) milik Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur dan Pemerintah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II.
- r. Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh Bank sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## II. PT Penjaminan Kredit Daerah NTT (PT JAMKRIDA NTT)

### ➤ Dasar Hukum PT Penjaminan Kredit Daerah NTT (PT JAMKRIDA NTT)

1. Surat Otoritas Jasa Keuangan Nomor : S-595/NB.2/2018 tanggal 4 Oktober 2018 tentang Perusahaan Penjaminan dan Konsorsium Yang Dapat Memasarkan Produk Suretyship per 14 Agustus 2018;
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor : 2/POJK.05/2017 tentang Penyelenggaraan Usaha Lembaga Penjamin;
3. Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan;
4. Akta Pendirian PT Penjaminan Kredit Daerah Nusa Tenggara Timur Nomor : 52 tanggal 24 September 2014 melalui Silvester J. Mambaitfeto, SH, Notaris di Kupang.
5. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : AHU-33170.40.10.2014 tanggal 6 November 2014 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT Penjaminan Kredit Daerah Nusa Tenggara Timur;
6. Keputusan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : Kep-144/D.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Pemberian Izin Usaha Perusahaan Penjaminan Kredit kepada PT Penjaminan Kredit Daerah Nusa Tenggara Timur;
7. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor : 2 Tahun 2013 tanggal 7 Oktober 2013 tentang Pendirian Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Nusa Tenggara Timur;
8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 99/PMK.010/2011 Perubahan atas PMK Nomor 222/PMK.010/2008 tentang Perusahaan Penjaminan Kredit dan Perusahaan Penjaminan Ulang Kredit;
9. Peraturan Presiden RI Nomor 2 Tahun 2008 tentang Lembaga Penjaminan.
10. Akta Pendirian 52 tanggal 24 September 2014
11. Perda Provinsi NTT Nomor 2 tanggal 7 Oktober 2013.

### ➤ Core Business PT Penjaminan Kredit Daerah NTT (PT JAMKRIDA NTT)

#### Penjaminan Kredit Multiguna

#### PENJAMINAN KREDIT

- Penjaminan Kredit Multiguna
- Penjaminan Kredit Produktif
- Penjaminan Kredit Konstruksi

#### PENJAMINAN PROYEK

- Penjaminan Kontra Bank Garansi
- Penjaminan Surety Bond

### **III. PT FLOBAMOR**

#### **➤ Dasar Hukum PT Flobamor**

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja, dan Anggaran BUMD;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pengelola BUMD;
7. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Flobamor;
8. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 13 Tahun 2009 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah (PD) Flobamor menjadi Perseroan Terbatas (PT) Flobamor;
9. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 59 Tahun 2009 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 13 Tahun 2009 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah (PD) Flobamor menjadi Perseroan Terbatas (PT) Flobamor.

#### **➤ Core Business PT Flobamor**



#### **IV. PT KAWASAN INDUSTRI BOLOK (PT KIB)**

##### **➤ Dasar Hukum PT Kawasan industri Bolok (PT KIB)**

1. Peraturan Daerah Provinsi NTT nomor 6 tahun 1997 tentang Pengelolaan Kawasan Industri Bolok
2. Peraturan Daerah Provinsi NTT nomor 13 tahun 2018 tentang Pengelolaan Kawasan Industri Bolok
3. Peraturan Daerah Provinsi NTT nomor 6 tahun 2019 tentang Pendirian PT.Kawasan Industri Bolok (Perseroda)
4. Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Kawasan Industri Bolok Nomor 25 Tanggal 27 Mei 2020 Notaris Serlina Sari Dewi Darmawan, S.H., M.Kn.
5. Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor AHU0025205.AH.01.01.TAHUN 2020 Tanggal 28 Mei 2020 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan terbatas PT Kawasan Industri Bolok
6. Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Nomor Induk Berusaha (NIB) 1279000221179 tanggal 17 Februari 2021
7. Analisis Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) Kawasan Industri Bolok Nomor 3 Tahun 2005 Tanggal 24 Februari 2005
8. Perda nomor 6 Tahun 1997 tentang Pengelolaan KI Bolok dicabut dan diganti dengan Perda Baru nomor 13 tahun 2018 tentang Pengelolaan KI Bolok
9. Perda nomor 6 tahun 2019 tentang Pendirian PT. Kawasan Industri Bolok (Perseroda).

##### **➤ Core Business PT Kawasan industri Bolok (PT KIB)**

###### **A. Bisnis utama**

Sewa lahan :

Pemanfaatan lahan oleh pelaku bisnis dengan pola menyewakan lahan Dengan status HGB.

###### **B. Bisnis Tambahan**

- Sewa bangunan/gedung; bangunan pabrik atau gudang siap pakai.
- Sentra produksi kerajinan dan industry rumah tangga (IKM)
- Kantin/restoran
- Mini Market
- Stasiun pengisian bahan bakar
- Freight forwarding (Jasa pengangkutan barang; pengiriman dan penerimaan barang baik darat, laut maupun udara)
- Sarana olahraga
- Exhibition Outdoor (lokasi pameran)
- Business Centre (fotocopy, fax/telpon/warnet dll)

**C. Pelayanan Komersial non Profit**

- Keamanan dan kebersihan (sampah)
- Pemeliharaan jalan
- Pemeliharaan lampu jalan
- Informasi bisnis
- Konsultasi; Kelayakan usaha, pajak, hukum dll
- Jaringan telekomunikasi
- Jaringan listrik
- Jaringan air bersih
- Centra Unit pengolahan limbah
- Pembuatan tempat sampah

**D. Pelayanan Non Komersial**

- Jasa Pengurusan ijin-ijin dan penyelesaian dokumen
- Jasa membantu mencari tenaga kerja
- Jasa pembuatan Site Plan dan Pengukuran Jalan

**E. Lain – Lain**

- Poliklinik
- Jasa Kontraktor
- Dan lain-lain

**F. Skema Pembayaran**

- Skema pembayaran sewa untuk sewa lahan, bangunan pabrik siap pakai dan gudang dapat dilakukan pembayaran setiap tahun atau setiap 5 tahun sekali
- Pembayaran dilakukan pada saat penandatanganan sewa kontrak
- Kontrak dapat dilakukan sampai dengan jangka waktu 25 tahun dan dapat diperpanjang.

## BADAN LAYANAN UMUM DAERH (BLUD) TAHUN 2023

### A. RSUD PROF. DR. W.Z. JOHANES

#### 1. Profil Umum

Profil Umum	
Informasi Umum	
<b>Nama BLUD</b>	RSUD Prof. dr. W.Z. Johannes
<b>Alamat</b>	Jl. Moch Hatta No. 19, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur
<b>Pemimpin</b>	dr. drg. Mindo E Sinaga, M.Kes, Direktur
<b>Jenis Layanan BLUD</b>	Kesehatan
Informasi BLUD	
<b>Pembina Teknis BLUD</b>	Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur
<b>Pembina Keuangan BLUD</b>	Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur
<b>Penetapan sebagai BLUD</b>	Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 433/KEP/HK/2010 tentang Persetujuan Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) Penuh kepada Rumah Sakit Umum Daerah Prof.dr.W.Z. Johannes Kupang
<b>Tanggal Penetapan BLUD</b>	22 Desember 2010

#### 2. Layanan

Pelayanan medis dan perawatan yang diberikan RSUD Prof. dr. W.Z. Johannes Kupang adalah:

- 1) Instalasi Gawat Darurat (Pelayanan 24 Jam): IGD Umum; IGD Ponak
- 2) Instalasi Rawat Jalan
  - a. Poliklinik Spesialis Dasar: Klinik Penyakit Dalam; Klinik Anak; Klinik Bedah; Klinik Obstetri dan Ginekologi;
  - b. Poliklinik Spesialis Lain: Klinik Penyakit Mata; Klinik Telinga Hidung dan Tenggorokan; Klinik Kulit dan Kelamin; Klinik Penyakit Syaraf; Klinik Rehabilitasi Medik; Klinik Jantung dan Pembuluh Darah; Klinik Paru; Klinik Jiwa; Klinik Bedah Saraf; Klinik Urologi; Klinik Orthopedi; Klinik Konservasi Gigi; Klinik Bedah Mulut; Klinik Bedah Plastik; Klinik Bedah Anak; Spesialis Gizi Klinik; dan Spesialis Kesehatan Olahraga
  - c. Poliklinik Subspesialis: Subspesialis Bedah Onkologi; Subspesialis Ginekologi Onkologi; Subspesialis Jantung Intervensif; Subspesialis Bedah Digestif; Subspesialis Tumbuh Kembang Anak; Subspesialis Hemato

Onkologi; Subspesialis Fertilitas Endokrin Reproduksi; Subspesialis Fetomaternal.

- d. Klinik Khusus: Klinik Khusus TB DOT'S; Klinik Khusus TB MDR; Klinik Khusus Pelayanan HIV (VCT); Klinik Khusus PKT PA (Pusat Krisis Terpadu Perempuan dan Anak); Klinik Khusus Geriatri; Klinik Gigi dan Mulut
- 3) Instalasi Rawat Inap: Ruang Perawatan Anak (Kelas 1,2,3 dan Kelas Utama); Ruang Perawatan Dewasa Laki dan Perempuan (Kelas 1, 2, 3, dan Kelas Utama); Ruang Perawatan Isolasi TB (nonkelas); Ruang Perawatan Isolasi Tekanan Negatif; Ruang Perawatan Isolasi Tekanan Negatif TB MDR; Ruangan Imunitas Menurun (RIM).
- 4) Instalasi Perawatan Intensif: Ruang ICU/PICU Nonkelas; Ruang ICCU Nonkelas; Ruang NHCU Nonkelas; Ruang NICU Nonkelas.
- 5) Instalasi Bedah Sentral
- 6) Instalasi Rehabilitasi Medik
- 7) Unit Haemodialisa
- 8) Unit Endoscopy
- 9) Unit Bronchoscopy
- 10) Penunjang Medik: Instalasi Farmasi; Instalasi Radiodiagnostik (X ray termasuk panoramic, CT Scan, USG); Instalasi Laboratorium Patologi Klinik; Instalasi Laboratorium Patologi Anatomi; Unit Transfusi Darah/Bank Darah (UTD RS/BD RS); Instalasi Pemulasaran Jenazah
- 11) Kegiatan Penunjang Nonmedik; Instalasi CSSD; Instalasi Dapur Utama dan Gizi Klinik; Unit Laundry; Unit Sanitasi; Instalasi Pemeliharaan Sarana Rumah Sakit (IPSRS); Pelayanan Diklat



## B. SPAM PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

### 1. Profil Umum

Profil Umum	
Informasi Umum	
<b>Nama BLUD</b>	SPAM Provinsi Nusa Tenggara Timur
<b>Alamat</b>	Jl. Basuki Rachmat No. 1 Kupang, Nusa Tenggara Timur
<b>Pemimpin</b>	Erasmus Jogo, S.E., M.M., Kepala BLUD
<b>Jenis Layanan BLUD</b>	Pelayanan air minum
<b>Informasi Lainnya</b>	<p>1. Kesepakatan Bersama Gubernur Nusa Tenggara Timur, Bupati Kupang dan Walikota Kupang Nomor HK.02 Tahun 2009; Nomor 5 Tahun 2009; Nomor 03/HK/PEMKOT/2009 tentang Kelembagaan Pengelola Air Minum.</p> <p>2. Surat Kepala Dinas PU Provinsi NTT Nomor: PU.PTR.05.01/900/12/11/09 tentang Pengajuan Permohonan Penerapan Pola BLUD PK-BLUD SPAM</p> <p>3. Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur NO.176/KEP/HK/2009 tanggal 12 Februari 2009 tentang Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Sistem Penyediaan Air Minum (PPK-BLUD SPAM) pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur (telah diganti dengan Keputusan Gubernur No. 134/KEP/HK/2013 tanggal 25 April 2013).</p> <p>4. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur No.19 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Layanan Umum Daerah Penyediaan Air Minum Provinsi Nusa Tenggara Timur (telah diganti dengan Peraturan Gubernur No. 77 Tahun 2020) Berita Acara Nomor: 13/DA/2011 dan Nomor:</p> <p>5. Berita Acara Nomor: 13/DA/2011 dan Nomor: HK.12 Tahun 2011 tentang Serah Terima Operasi dan Pemeliharaan Unit Air Baku dan Unit Produksi Air Minum Tilong dan Tulun di Kabupaten Kupang Provinsi NTT dari Direktorat Jenderal SDA Kementerian PU kepada Pemerintah Provinsi NTT.</p>
Informasi BLUD	
<b>Pembina Teknis BLUD</b>	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Nusa Tenggara Timur
<b>Pembina Keuangan BLUD</b>	Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur
<b>Penetapan sebagai BLUD</b>	<p>Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 176/KEP/HK/2009</p> <p>Tentang Persetujuan Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan</p> <p>Umum Sistem Penyediaan Air Minum Provinsi Pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur</p>
<b>Tanggal Penetapan BLUD</b>	22 uni 2009

### 2. Layanan

Pelayanan yang diberikan SPAM Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah penyediaan air minum dari bendungan Tilong. Bendungan Tilong terletak di Desa Oelnasi, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, berjarak kurang lebih 25 kilometer sebelah timur

Kota Kupang. Bendungan Tilong dibangun pada tahun 1998 hingga tahun 2002 dengan kapasitas tampung 19,07 juta m<sup>3</sup> dengan tujuan untuk menampung aliran air permukaan Sungai Tilong dan air hujan dan dimanfaatkan untuk:

- 1) Kebutuhan irigasi seluas 1.484 Ha yang terdiri dari areal existing 545 Ha dan areal pengembangan 939 Ha.
- 2) Kebutuhan air minum Kota Kupang, Kabupaten Kupang dengan kapasitas produksi 150 liter/detik dan penduduk sekitar bendungan 2,5 liter/detik.
- 3) Selain kebutuhan di atas Bendungan Tilong juga berfungsi sebagai pengendali banjir, tempat wisata, perikanan air tawar serta konservasi sumber daya air.

Air baku dari Bendungan Tilong didorong ke Water Treatment Plan (WTP) Tulun melalui bangunan Pre Sedimentasi yang berlokasi kurang lebih 0,87 kilometer di bawah Bendungan Tilong. Kapasitas produksi Sistem Penyediaan Air Minum di IPA Tilong dan WTP Tulun dengan 150 liter per detik yang apabila dioperasikan 8 jam per hari diperoleh produksi air minum 108.000 m<sup>3</sup> per bulan (25 hari pelayanan). Kapasitas produksi ini dapat melayani sampai 8000 lebih sambungan rumah per hari, dengan asumsi pemakaian air per kepala keluarga per hari sebesar 500 liter atau 0,5 m<sup>3</sup> .

## C. RSUD S.K. LERIK

### 1. Profil Umum

Profil Umum	
Informasi Umum	
<b>Nama BLUD</b>	RSUD S.K. Lerik
<b>Alamat</b>	Jl. Timor Raya NO 134 Pasir Panjang
<b>Pemimpin</b>	drg. Dian Sukmawati Arkiang, Direktur
<b>Jenis Layanan BLUD</b>	Kesehatan
Informasi BLUD	
<b>Pembina Teknis BLUD</b>	Dinas Kesehatan Kota Kupang
<b>Pembina Keuangan BLUD</b>	Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Kupang
<b>Penetapan sebagai BLUD</b>	Surat Keputusan Walikota Kupang Nomor 74/KEP/HK/2015 Tanggal 23 Februari 2015 tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah S.K. Lerik sebagai Instansi/SKPD Pemerintah Daerah Kota Kupang yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) dengan status Badan Layanan Umum Daerah secara penuh.
<b>Tanggal Penetapan BLUD</b>	23 Februari 2015

### 2. Layanan

Jenis pelayanan kesehatan yang diberikan RSUD S.K. Lerik diuraikan sebagai berikut:

Jenis Pelayanan RSUD S.K. Lerik		
No	Jenis Pelayanan	Poli Instalasi
1	Pelayanan Gawat Darurat	Instalasi Gawat Darurat
2	Pelayanan Operasi	Instalasi Kamar OK
3	Pelayanan <i>Intensive Care Unit</i> (ICU)	Instalasi ICU
4	Pelayanan Bersalin (Trise IGD)	Kamar Bersalin (VK)
5	Pelayanan <i>High Core Unit</i> (HCU)	Instalasi JCU
6	Pelayanan <i>Pediatric Intensive Care Unit</i> (PICU)	Instalasi PICU
Pelayanan Gawat Jalan		
7	Pelayanan Gigi dan Mulut	Poliklinik Gigi dan Mulut
8	Pelayanan Anak	Poliklinik Anak
9	Pelayanan Bedah	Poliklinik Bedah
10	Pelayanan Penyakit Dalam	Poliklinik Penyakit Dalam
11	Pelayanan Gertari	Poliklinik Geriatri
12	Pelayanan Obstetri dan Ginekologi	Poliklinik Kandungan
13	Pelayanan Mata	Poliklinik Mata
14	Pelayanan Rahap Medik	Poliklinik Rahap Medik
15	Pelayanan Medicolegal	Poliklinik <i>Medicolegal</i>
16	Pelayanan Gizi	Poliklinik Gizi

17	Pelayanan THT	Poliklinik THT
<b>Pelayanan Rawat Jalan</b>		
18	Pelayanan Perawatan Umum	Ruang Rawat Inap Garuda
19	Pelayanan Perawatan Obstetri dan Ginekologi	Ruang Rawat Inap Bersalin/Nifas
20	Pelayanan Perawatan Neonatus	Ruang Perawatan Neonatologi
21	Pelayanan ICU Isolasi	Ruang ICU Isolasi
22	Pelayanan Isolasi Rajawali	Ruang Isolasi Rajawali
<b>Pelayanan Penunjang Medik</b>		
23	Pelayanan Radiologi	Instalasi Radiologi
24	Pelayanan Laboratorium	Instalasi Laboratorium
25	Pelayanan Fisioterapi	Unit Rehabilitas Medik
26	Pelayanan Obat, Alkes, dan Bahan Habis Pakai	Instalasi Farmasi
27	Pelayanan Darah	Bank Darah
<b>Pelayanan Penunjang Nonmedik</b>		
28	Pelayanan Gizi	Instalasi Gizi dan Dapur
29	Pelayanan Laundry/Linen	Instalasi Laundry/Linen
30	Pelayanan Mobil Ambulance	<i>Ambulance</i>
31	Pelayanan Pengendalian Limbah dan Penyediaan Air Bersih	Instalansi Sanitasi
<b>Pelayanan Administrasi</b>		
32	Pelayanan Rekam Medis	Loket Poliklinik
33	Pelayanan Rujukan	Loket Poliklinik
34	Pelayanan GAKIN	Loket Poliklinik dan Instalasi
<b>Pelayanan Pemeliharaan Sarana Rumah Sakit</b>		
35	Pelayanan Pemeliharaan Kerusakan Alat	IPRS
36	Pelayanan Pemeliharaan Peralatan Laboratorium	IPRS dan Instalasi Laboratorium

## D. RSUD NAIBONAT

### 1. Profil Umum

Profil Umum	
Informasi Umum	
Nama BLUD	RSUD Naibonat Kelas C Kabupaten Kupang
Alamat	Jl. Timor Raya KM 37 Oelamasi Kabupaten Kupang
Pemimpin	dr. Erol P.A. Nenobais, Direktur
Jenis Layanan BLUD	Kesehatan
Pendirian	1. Keputusan Bupati Kupang Nomor KP2TSP.TTU.440/01/SIPRS/IV/2012 tentang izin Pendirian Rumah Sakit dengan Rumah Sakit Umum Daerah Naibonat Kabupaten Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur; 2. Keputusan Bupati Kupang Nomor 176/Kep/HK/2015 tentang Izin Operasional Rumah Sakit Umum Daerah Naibonat Kelas C Kabupaten Kupang, tanggal 29 April 2015; 3. Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Nomor 002/KEP/DPM-PTSP/2021 Tentang Izin Operasional Rumah Sakit Umum Daerah Naibonat Kelas C Kabupaten Kupang.
Informasi BLUD	
Pembina Teknis BLUD	Dinas Kesehatan Kabupaten Kupang
Pembina Keuangan BLUD	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kupang
Penetapan sebagai BLUD	Keputusan Bupati Kupang Nomor 590/KEP/HK/2016 tentang Penetapan Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) Rumah Sakit Umum Daerah Naibonat Kelas C Kabupaten Kupang
Tanggal Penetapan BLUD	27 Desember 2016

### 2. Layanan

Kegiatan utama RSUD Naibonat adalah menyelenggarakan pelayanan kesehatan. Kegiatan tersebut diselenggarakan dalam upaya penyembuhan, pemulihan, peningkatan dan pencegahan pelayanan rujukan dan menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan serta pengabdian masyarakat. Sebagaimana tertuang pada Rencana Bisnis Anggaran RSUD Naibonat Tahun 2023, RSUD Naibonat membentuk unit pelayanan yang membawahi semua ruangan/instalasi pada RSUD Naibonat dengan melayani sebanyak 31 jenis ruangan dan instalasi.

No	Jenis Pelayanan	Poli/Instansi
1	Pelayanan Gawat Darurat	Instalasi Gawat Darurat
2	Pelayanan Triase	Triase VK
3	Pelayanan Operasi	Kamar Operasi
4	Pelayanan Bersalin	Kamar Bersalin (VK)
<b>RAWAT JALAN</b>		
5	Pelayanan Anak Dan Mulut	Klinik Gigi Dan Mulut
6	Pelayanan Anak	Klinik Anak
7	Pelayanan Bedah	Klinik Bedah
8	Pelayanan Penyakit Dalam	Klinik Penyakit Dalam
9	Pelayanan Obsetetri Ginekologi	Klinik KIA
10	Pelayanan Penyakit Kulit Kelamin	Klinik penyakit kulit dan kelamin
11	Pelayanan VCT	Klinik VCT
12	Pelayanan Fisiotherapi	Klinik Fisiotherapi
13	Pelayanan Saraf	Klinik Saraf
<b>RAWAT INAP</b>		
14	Pelayanan Rawat Inap Kelas III	Ruang Perawatan Laki, Wanita
15	Pelayanan Obsgyn	Ruang Perawatan Nifas, Wanita
16	Pelayanan Perawatan VIP	Ruang VIP
17	Pelayanan Penyakit Anak	Ruang Anak
18	Pelayanan Perawatan NICU	Ruang Perawatan Perinatologi
<b>PENUNJANG MEDIK</b>		
19	Pelayanan Radiologi	Instalasi Radiologi
20	Pelayanan Laboratorium	Instalasi Laboratorium
21	Pelayanan Obat, Alkes dan Bahan Habis Pakai	Instalasi Farmasi
22	Pelayanan Darah	Pelayanan Transfusi Darah
23	CSSD	Pelayanan CSSD
24	Pelayanan Gizi	Instalasi Gizi
25	Pelayanan Pemulasaran Jenazah	Pemulasaran Jenazah
<b>PENUNJANG NON MEDIK</b>		
26	Pelayanan Laundry/Linen	Laundry (Linen)
27	Pelayanan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit	Instalasi Pemeliharaan Sarana Prasarana RS
28	Pelayanan Ambulance	Ambulance
29	Pelayanan Sanitasi	Sanitasi, Lain-lain
30	Pelayanan Rekam Medik	Rekam Medik
31	Pelayanan ICI (Intensif Care Unit)	Ruang Icu

## E. RSUD DR. T.C. HILLERS MAUMERE

### 1. Profil Umum

Profil Umum	
Informasi Umum	
Nama BLUD	RSUD dr. T.C Hillers Maumere
Alamat	Jalan Wairklau, Kelurahan Kota Uneng, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka, Provinsi Nusa Tenggara Timur
Pemimpin	dr. Clara Yosefina Francis, MPH, Direktur
Jenis Layanan BLUD	Kesehatan
Informasi Lainnya	Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 210/Menkes/II/1993, ditetapkan sebagai Rumah Sakit Tipe C
Informasi BLUD	
Pembina Teknis BLUD	Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka
Pembina Keuangan BLUD	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sikka
Penetapan sebagai BLUD	Keputusan Bupati Sikka Nomor 495/HK/2013 tentang Penetapan RSUD dr. T.C. Hillers Maumere Sebagai Badan Layanan Umum Daerah
Tanggal Penetapan BLUD	31 Desember 2013
Peraturan Pelaksanaan BLUD	<p>Untuk mendukung penerapan PPK BLUD, telah dikeluarkan peraturan pelaksanaan, yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>o Peraturan Bupati Sikka Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Teknis PPK BLUD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sikka;</li> <li>o Peraturan Bupati Sikka Nomor 28 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pinjaman pada BLUD RSUD dr. T.C. Hillers Maumere;</li> <li>o Peraturan Bupati Sikka Nomor 29 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengangkatan dan pemberhentian Pegawai Bukan PNS pada BLUD RSUD dr. T.C. Hillers Maumere;</li> <li>o Peraturan Bupati Sikka Nomor 30 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengadaan Barang dan Jasa pada BLUD RSUD dr. T.C. Hillers Maumere;</li> <li>o Peraturan Bupati Sikka Nomor 20 Tahun 2014 tentang Mekanisme Kerja sama BLUD ;</li> <li>o Peraturan Bupati Sikka Nomor 36 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) RSUD dr. T.C. Hillers Maumere;</li> <li>o Peraturan Bupati Sikka Nomor 39 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengaturan Jasa Pelayanan pada RSUD dr. T.C. Hillers Maumere;</li> <li>o Peraturan Bupati Sikka Nomor 40 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Fleksibilitas Biaya, Pengelolaan Surplus Kas dan Defisit Anggaran pada BLUD RSUD dr. T.C. Hillers Maumere.</li> </ul>

## **2. Layanan**

Layanan Jenis pelayanan kesehatan yang diberikan RSUD dr. T.C. Hillers Maumere adalah:

- 1) Pelayanan Rawat Jalan terdiri dari : Klinik Penyakit Dalam, Klinik Bedah, Klinik Anak, Klinik Kebidanan dan Kandungan, Klinik Gigi, Klinik Mata, Klinik THT, Klinik Syaraf, Klinik Jiwa, Klinik Kulit dan Kelamin, Klinik VCT, Klinik TB DOTs\_MDR, dan Rehabilitasi Medik.
- 2) Pelayanan Gawat Darurat - 24 jam (termasuk pelayanan PONEK dan pelayanan COVID-19)
- 3) Pelayanan Rawat Inap terdiri dari: ruang perawatan Kebidanan dan Kandungan (kapasitas 34 TT), ruang perawatan Bedah (31 TT), ruang perawatan Anak (kapasitas 36 TT), 2 ruang perawatan Penyakit Dalam (kapasitas 62 TT), paviliun (kapasitas 9 TT) dan Ruang Isolasi COVID (kapasitas 15 TT).
- 4) Pelayanan Rawat Intensif : ICU (kapasitas 6 TT) dan NICU (kapasitas 9 TT).
- 5) Pelayanan pembedahan (Bedah Central).
- 6) Pelayanan CT SCAN
- 7) Pelayanan Hemodialisa
- 8) Pelayanan terapi oxygen murni (Hyperbaric Chamber)
- 9) Pelayanan Penunjang Medik, meliputi: Pelayanan Farmasi; Pelayanan Radiologi; Pelayanan Transfusi Darah; Pelayanan Laboratorium; dan Pelayanan Gizi Rumah Sakit
- 10) Pelayanan penunjang non medik, meliputi: Pelayanan Oksigen; Pelayanan Sterilisasi dan Binatu (CSSD & Laundry); Instalasi Pemeliharaan Sarana Rumah Sakit; Instalasi Sanitasi Rumah Sakit; dan Pelayanan transportasi pasien (ambulance) dan jenazah
- 11) Pelayanan administrasi dan keuangan.
- 12) Pelayanan pendidikan, pelatihan dan penelitian.



## F. RSUD WAIKABUBAK

### 1. Profil Umum

Profil Umum	
Informasi Umum	
Nama BLUD	RSUD Waikabubak
Alamat	Jl. Adhyaksa Km3, Kelurahan Dira Tana, Kec. Loli, Kota Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat
Pemimpin	dr. Japendi Rizall Pavliando Saragih, Sp.A., M.Biomed, Direktur
Jenis Layanan BLUD	Kesehatan
Pendirian	RSUD Waikabubak beroperasi sejak 5 Juli 1985 sebagai rumah sakit Tipe D. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 519/Menkes/SK/VIII/2009 RSUD Waikabubak ditetapkan sebagai rumah sakit Tipe C.
Informasi BLUD	
Pembina Teknis BLUD	Dinas Kesehatan Kabupaten Sumba Barat
Pembina Keuangan BLUD	Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumba Barat
Penetapan sebagai BLUD	Keputusan Bupati Sumba Barat Nomor KEP/HK/220/2014 tentang Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Umum Daerah Waikabubak Kabupaten Sumba Barat
Tanggal Penetapan BLUD	10-Apr-14

### 2. Layanan

Kegiatan utama RSUD Waikabubak adalah menyelenggarakan pelayanan kesehatan. Sebagaimana tertuang pada Rencana Strategi Bisnis RSUD Waikabubak Tahun 2021-2026, RSUD Waikabubak memiliki unit pelayanan sebagai berikut:

- 1) Instalasi Gawat Darurat (IGD)
- 2) Pelayanan Rawat Jalan: Pelayanan Poliklinik Bedah; Pelayanan Poliklinik Interna; Pelayanan Poliklinik Gigi dan Mulut; Pelayanan Poliklinik Kesehatan Anak; Pelayanan Poliklinik Kebidanan dan Kandungan; Pelayanan Keluarga Berencana; Pelayanan Konsultasi Gizi; Pelayanan Rehabilitasi Medik; Pelayanan Laboratorium; Pelayanan Farmasi; Pelayanan Rontgen; Pelayanan VCT HIV/AIDS; Pelayanan UTDRS.
- 3) Pelayanan Rawat Inap: Perawatan Penyakit Dalam; Perawatan Bedah; Perawatan Anak; Perawatan Kebidanan dan Kandungan; Perawatan NICU; Perawatan ICU; VIP
- 4) Instalasi Bedah Sentral (IBS)
- 5) Kamar Bersalin (Kebidanan)
- 6) Pelayanan Penunjang Medik: Instalasi Laboratorium; Instalasi Radiologi; Instalasi Farmasi; Instalasi Rehabilitasi Medik

- 7) Pelayanan Penunjang Non Medik: Unit Gizi; Unit Pemeliharaan Sarana; Unit Pemulasaran Jenazah; Unit Ambulance; dan Satuan Keamanan dan Ketertiban.
- 8) Pelayanan Pendidikan dan Pelatihan
- 9) Pelayanan Administrasi dan Manajemen

## **G. UPTD SPAM KABUPATEN MANGGARAI TIMUR**

### **1. Profil Umum**

<b>Profil Umum</b>	
<b>Informasi Umum</b>	
Nama BLUD	UPTD SPAM Kabupaten Manggarai Timur
Alamat	Golo Lada, Rana Loba, Borong
Pemimpin	Fransiskus Yun Aga, A.Md.Kom., Kepala UPTD
Jenis Layanan BLUD	Penyediaan Layanan Air Minum
<b>Informasi BLUD</b>	
Pembina Teknis BLUD	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Manggarai Timur
Pembina Keuangan BLUD	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Manggarai Timur
Penetapan sebagai BLUD	Keputusan Bupati Manggarai Timur Nomor HK/152.A/2021 Tahun 2021 tentang Penerapan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Sistem Penyediaan Air Minum pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Manggarai Timur
Tanggal Penetapan BLUD	06-Sep-21

### **2. Layanan**

Pelayanan air minum bersih merupakan bisnis utama yang dilaksanakan UPTD SPAM Kabupaten Manggarai Timur. Penyelenggaraan air minum di tingkat kabupaten menempatkan UPTD SPAM sebagai operator atau pengelola yang bertanggungjawab terhadap teknis operasional pelayanan air minum. Sebagai operator air minum yang bergerak di tingkat perkotaan, UPTD SPAM memberikan pelayanan utama untuk pelanggan berupa sambungan baru, pindah lokasi, balik nama, dan ganti meter.

Untuk menjaga kualitas pelayanan, UPTD SPAM menerapkan sistem pelayanan yang transparan dan akuntabel. Setiap tahapan pelayanan dilakukan secara elektronik baik sisi administrasi maupun proses keuangan. Saat ini pelayanan administrasi keuangan baik penerimaan maupun pengeluaran dilaksanakan secara non tunai. Khusus transaksi non tunai pada penerimaan daerah UPTD SPAM merupakan unit kerja pertama di Kabupaten Manggarai Timur yang menerapkan hal tersebut dan merupakan satu-satunya hingga saat ini.

UPTD SPAM Kabupaten Manggarai Timur merupakan operator air minum yang berkedudukan di kabupaten dan membawahi unit sistem penyediaan air minum pada seluruh instalasi kota kecil (IKK) di kecamatan. Sistem jaringan dan cakupan pelayanan sebagai berikut:

- 1) **SPAM Rana Mese**, dengan wilayah pelayanan Kecamatan Rana Mese: Desa Bangka Kempo, Desa Wae Nngori, Desa Golo Kantar; Kecamatan Borong: Desa Bangka Kantar,

- Desa Gurung Liwut, Kelurahan Satar Peot, Kelurahan Rana Loba; dan Kecamatan Kota Komba: Desa Ruan, Kelurahan Tanah Rata.
- 2) **SPAM Wae Kewo**, dengan wilayah pelayanan Kecamatan Sambu Rampas: Desa Satar Nawang, Desa Golo Ngawan, Desa Buti, Desa Golo Pari, Desa Wea, Desa Benteng Wunis, Kelurahan Golo Wangkung, Kelurahan Golo Wangkung Barat.
  - 3) **SPAM Wae Mao**, dengan wilayah pelayanan Kecamatan Rana Mese: Desa Compang Kempo, Desa Sita, Desa Watu Mori; Kecamatan Borong: Desa Compang Ndejing, Desa Golo Kantar, Desa Nanga Labang, Kelurahan Kota Ndora.
  - 4) **SPAM Wae Ros**, dengan wilayah pelayanan Kecamatan Lamba Leda Selatan: Desa Bangka Pau, Kelurahan Mando awu, Desa Golo Lobos, Desa Compang Wesang.
  - 5) **SPAM Rana Poja**, dengan wilayah pelayanan Kecamatan Lamba Leda Selatan: Desa Deno, Desa Leong. Kecamatan Lamba Leda Timur: Desa Wejang Mawe.
  - 6) **SPAM Wae Tabar**, dengan wilayah pelayanan Kecamatan Sambu Rampas: Desa Nanga Mbaling, Kelurahan Pota.
  - 7) **SPAM Wae Naru**, dengan wilayah pelayanan Kecamatan Kota Komba Utara: Desa Golo Meni
  - 8) **SPAM Wae Lecok**, dengan wilayah pelayanan Kecamatan Lamba Leda Timur: Desa Golo Lero, Desa Rengkam.
  - 9) **SPAM Wae Buang**, dengan wilayah pelayanan Kecamatan Kota Komba: Kelurahan Watungene
  - 10) **SPAM Buntang Rana**, dengan wilayah pelayanan Kecamatan Elar: Desa Rana Gapang, Kelurahan Tiwu Kondo, Desa Biting
  - 11) **SPAM Liang Kalo**, dengan wilayah pelayanan Kecamatan Elar Selatan: Desa Golo Linus, Desa Sangan Kalo

## H. RSUD KEFAMENANU

### 1. Profil Umum

Profil Umum	
Informasi Umum	
Nama BLUD	RSUD Kefamenanu
Alamat	Jl Letjen Soeprapto, Kel. Kefamenanu Tengah, Kec. Kota Kefamenanu, Kab. Timor Tengah Utara, Provinsi Nusa Tenggara Timur Kode Pos 85612
Pemimpin	dr Zakarias E Fernandez, M.Kes, Direktur
Jenis Layanan BLUD	Kesehatan
Informasi BLUD	
Pembina Teknis BLUD	Dinas Kesehatan Kabupaten Timor Tengah Utara
Pembina Keuangan BLUD	Badan Keuangan dan Aset Kabupaten Timor Tengah Utara
Penetapan sebagai BLUD	Keputusan Bupati Timor Tengah Utara Nomor 224/KEP/HK/IV/2015 tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah Kefamenanu sebagai Badan Layanan Umum Daerah
Tanggal Penetapan BLUD	13 April 2015, mulai berlaku tanggal 2 Januari 2016

### 2. Layanan

Jenis-jenis pelayanan pada RSUD Kefamenanu adalah:

- 1) Pelayanan Rawat Darurat: gawat darurat; operasi; Intensive Care Unit (ICU); bersalin.
- 2) Pelayanan Rawat Jalan: Penyakit Dalam; Anak; Gigi dan Mulut; Bedah; Konsultasi Gizi; Penyakit Dalam; Obstetri dan Ginekologi; Mata; Telinga, Hidung, Tenggorokan (THT); Voluntary Counseling Test (VCT) untuk menangani penyebaran HIV/AIDS; Bayi Sehat dan Imunisasi; dan Umum.
- 3) Pelayanan Rawat Inap: Penyakit Dalam; Obstetri dan Ginekologi; Penyakit Bedah; Perawatan VIP; Penyakit Anak; Perawatan Umum; Perawatan Neonatus; dan Bersalin.
- 4) Penunjang Medik: Radiologi; Laboratorium; Obat, Alkes, dan Bahan Habis Pakai; Fisioterapi; Darah; Rekam Medik.
- 5) Penunjang Non Medik: Laundry; Sarana dan Prasarana Rumah Sakit dan Sanitasi; Gizi; Mobil Ambulance; Informasi; Pemulasaran Jenazah.

## I. RSUD RUTENG

### 1. Profil Umum

Profil Umum	
Informasi Umum	
Nama BLUD	RSUD Ruteng
Alamat	Jl. dr. Soetomo No. 1 Kelurahan Watu, Kecamatan Langke Rembong Ruteng Kab. Manggarai, Provinsi Nusa Tenggara Timur
Pemimpin	dr. Oktavianus Yanuar Ampur, Sp. B, Direktur
Jenis Layanan BLUD	Kesehatan
Informasi BLUD	
Pembina Teknis BLUD	Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai
Pembina Keuangan BLUD	Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Manggarai
Penetapan sebagai BLUD	Keputusan Bupati Manggarai Nomor HK/399/2013 Tahun 2013 tentang Penetapan Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Umum Daerah Ruteng Kabupaten Manggarai
Tanggal Penetapan BLUD	12 Desember 2013

### 2. Layanan

No	Jenis Pelayanan	Poli/Instansi
1	<b>Pelayanan Gawat Darurat</b>	IGD
2	<b>Pelayanan Triase</b>	OK
3	<b>Pelayanan Operasi</b>	ICU
4	<b>Pelayanan Bersalin</b>	Kamar Bersalin (VK)
5	<b>Rawat Jalan</b>	
	Pelayanan Gigi Dan Mulut	Klinik Gigi dan Mulut
	Pelayanan Anak	Klinik Anak
	Pelayanan Bedah	Klinik Bedah
	Pelayanan Penyakit Dalam	Klinik Penyakit Dalam
	Pelayanan Kebidanan dan Kandungan	Klinik Kebidanan
	Pelayanan Mata	Klinik Mata
	Pelayanan THT	Klinik THT
	Pelayanan Jantung	Klinik Jantung
	Pelayanan VCT	Klinik VCT
	Pelayanan Konsultasi Gigi	<b>Klinik Gizi</b>
	Pelayanan umum	Klinik umum
	Pelayanan Hemodialisa	Unit Hemodialisa
6	<b>Rawat Inap</b>	
	Pelayanan Penyakit Dalam	Ruangan Perawatan Melati
	Pelayanan Kebidanan dan Kandungan	Ruangan Perawatan Anggrek
	Pelayanan Penyakit Bedah	Ruangan Perawatan Dahlia
	Pelayanan Perawatan Anak	Ruangan Teratai
	Pelayanan Perawatan VIP	Ruangan VIP A

	Pelayanan Perawatan VIP	Ruangan VIP B
	Pelayanan Perawatan umum	Ruangan Kls I Utama
	Pelayanan Neonatus	Ruangan NICU
	Pelayanan Perawatan Intensif	Ruangan ICU
<b>7</b>	<b>Penunjang Medik</b>	
	Pelayanan Radiologi	Instalasi Radiologi
	Pelayanan Laboratorium	Instalasi Laboratorium
	Pelayanan Obat, alkes dan bahan habis pakai	Instalasi Farmasi
	Pelayanan Fisioterapi	Instalasi Rehabilitasi Medik
<b>8</b>	<b>Penunjang Non Medik</b>	
	Pelayanan laundry/linen, pelayanan pengendalian limbah dan penyediaan air bersih	Instalasi Sanitasi
	Pelayanan pemeliharaan sarana RS	IPSRs
	Pelayanan Gizi	Instalasi Gizi
	Pelayanan mobil ambulance	Ambulance
	Pelayanan pemulasaran jenazah	Unit Pemulasaran Jenazah

---

## J. RSUD BAJAWA

### 1. Profil Umum

Profil Umum	
Informasi Umum	
Nama BLUD	RSUD Bajawa
Alamat	Jl. Diponegoro No. 5 Kelurahan Trikora, Kecamatan Bajawa, Kab. Ngada, Provinsi Nusa Tenggara Timur
Pemimpin	dr. Paulina H. H. Pelletimu, M.Kes., Sp. Rad., Direktur
Jenis Layanan BLUD	Kesehatan
Informasi BLUD	
Pembina Teknis BLUD	Dinas Kesehatan Kabupaten Ngada
Pembina Keuangan BLUD	Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ngada
Penetapan sebagai BLUD	Keputusan Bupati Ngada Nomor 194/KEP/RSUD/2014 tentang Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah pada RSUD Bajawa
Tanggal Penetapan BLUD	17 Juli 2014

### 2. Layanan

Jenis pelayanan kesehatan yang diberikan RSUD Bajawa adalah:

- Pelayanan Rawat Jalan: terdiri dari poliklinik Umum, poli KIA, poli Gigi, poli Bedah, poli Anak, poli VCT, dan poli Penyakit Dalam/internis.
- Pelayanan Gawat Darurat memiliki kemampuan penanganan bantuan hidup dasar (basic life support) dengan menyediakan fasilitas one day care dan penunjang medis yang dibuka selama 24 jam dengan tenaga medis profesional dan bersertifikat.
- Pelayanan Spesialis: yang terdiri dari spesialis Anak, spesialis Bedah, spesialis Penyakit Dalam, dan spesialis Kebidanan dan Kandungan.
- Pelayanan Spesialis Penunjang: yang terdiri dari spesialis Radiologi, spesialis Anesthesi, dan spesialis Patologi Klinik.
- Pelayanan Rawat Inap: terdiri dari VIP, Kelas I, Kelas II, Kelas III, Pelayanan Perawatan Intensif (Intensive Care Unit), dan Pelayanan Perawatan NICU (Neonatal Intensive Care Unit).
- Pelayanan Penunjang Medis: terdiri dari pelayanan Fisioterapi, pelayanan Radiologi, pelayanan Laboratorium, pelayanan BDRS, pelayanan Farmasi, dan Rekam Medis.
- Pelayanan Penunjang Non Medis: meliputi pelayanan gizi, laundry, pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit, pemulasaran jenazah, ambulance 24 jam, pengolahan limbah, dan central oksigen.
- Pelayanan Administrasi: meliputi keuangan, informasi penerimaan pasien, dan sistem informasi rumah sakit.



## K. BLUD RSUD SOE

### 1. Profil Umum

Profil Umum	
Informasi Umum	
Nama BLUD	RSUD Soe
Alamat	Jl. Bougenville No. 7 Soe, Timor Tengah Selatan
Pemimpin	dr. Erwin Leo, M.Kes, Direktur
Jenis Layanan BLUD	Kesehatan
Informasi BLUD	
Pembina Teknis BLUD	Dinas Kesehatan Kabupaten Timor Tengah Selatan
Pembina Keuangan BLUD	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan
Penetapan sebagai BLUD	Keputusan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor 266/KEP/HK/2015 tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah Soe untuk Melaksanakan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.
Tanggal Penetapan BLUD	26 Juni 2015

### 2. Layanan

Fasilitas pelayanan di RSUD Soe terdiri dari: (i) pelayanan perawatan meliputi rawat jalan dengan tujuh unit poliklinik (penyakit dalam, bedah, kebidanan dan kandungan, anak, maya, gigi, umum, geriatri, TB, VCT, dan fisioterapi), instalasi gawat darurat, pelayanan kandungan dan kebidanan, dan pelayanan rawat inap; dan (ii) pelayanan penunjang meliputi farmasi, radiologi, IPSRS, sanitasi, laboratorium, gizi, fisioterapi, pemulasaran jenazah, gas medis, laundry, dan VCT.

## L. RSUD MGR. GABRIEL MANEK SVD

### 1. Profil Umum

Profil Umum	
Informasi Umum	
Nama BLUD	RSUD Mgr. Gabriel Manek SVD Atambua
Alamat	Jl. dr. Soetomo No. 2 Atambua, Provinsi Nusa Tenggara Timur
Pemimpin	drg. Maria Ansilla F. Eka Mutty, Plt. Direktur
Jenis Layanan BLUD	Kesehatan
Informasi BLUD	
Pembina Teknis BLUD	Dinas Kesehatan Kabupaten Belu
Pembina Keuangan BLUD	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Belu
Penetapan sebagai BLUD	Keputusan Bupati Belu Nomor 23/HK/2014 tentang Penetapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Umum Daerah Mgr. Gabriel Manek SVD Atambua
Tanggal Penetapan BLUD	14 Februari 2014

## M. RSUD UMBU RARA MEHA

### 1. Profil Umum

Profil Umum	
Informasi Umum	
Nama BLUD	RSUD Umbu Rara Meha
Alamat	Jalan Adam Malik No. 54, Kembala, Kambajawa, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur
Pemimpin	dr. Rudi H. Damanik, Sp. Rad., Direktur
Jenis Layanan BLUD	Kesehatan
Informasi Lainnya	Berdasarkan Keputusan Bupati Sumba Timur No: 381/BINSOS.445/1386/IV/2015 tentang Penetapan Klasifikasi RSUD Umbu Rara Meha, ditetapkan sebagai Rumah Sakit Tipe kelas C.
Informasi BLUD	
Pembina Teknis BLUD	Dinas Kesehatan Kabupaten Sumba Timur
Pembina Keuangan BLUD	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumba Timur
Penetapan sebagai BLUD	Keputusan Bupati Sumba Timur Nomor 1/RSUD.440/02/1/2014 tentang Penetapan RSUD Umbu Rara Meha Waingapu Menjadi Badan Layanan Umum Daerah
Tanggal Penetapan BLUD	2 Januari 2014

### 2. Layanan

Jenis pelayanan yang diberikan RSUD Umbu Rara Meha adalah:

1. Unit Rawat Jalan: poli penyakit dalam; poli paru; poli umum; poli anak; poli bedah; poli kebidanan, kandungan, dan keluarga berencana; poli gigi dan mulut; poli mata; poli fisioterapi; poli saraf; poli geriatri; poli THT; poli VCT; dan klinik hemodialisa.
2. Unit Rawat Inap: kelas VIP; pasien dewasa; pasien anak; pasien bedah; pasien obgyn; ruang PICU; ruang ICU; dan ruang isolasi COVID-19; dan ruang perinatologi.
3. Unit Gawat Darurat; Unit Bedah Central; Unit Anestesi;
4. Unit Farmasi; Unit Gizi; Unit Pemulasaran Jenazah;
5. Unit Radiologi; Unit Laboratorium; Unit Transfusi Darah/Bank Darah; Unit Rekam Medik
6. Unit Sterilisasi/CSSD; Unit Pemeliharaan Sarana Rumah Sakit/IPSRs; Unit Instalasi SIMRS; Unit Promosi Kesehatan Rumah Sakit; Unit Handling Komplain.

## N. RSUD ENDE

### 1. Profil Umum

Profil Umum	
Informasi Umum	
Nama BLUD	RSUD Ende
Alamat	Jl. Prof. dr. WZ. Yohanes, Kelurahan Paupire, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende
Pemimpin	dr. Carolina M. Viany Sunti, Sp. PK, Direktur
Jenis Layanan BLUD	Kesehatan
Informasi Lainnya	Rumah Sakit Umum Ende ditetapkan sebagai rumah sakit umum tipe C sesuai Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1236/MENKES/SK/X/1997 tentang Peningkatan Kelas Rumah Sakit Umum Daerah Ende
Informasi BLUD	
Pembina Teknis BLUD	Dinas Kesehatan Kabupaten Ende
Pembina Keuangan BLUD	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ende
Penetapan sebagai BLUD	Keputusan Bupati Ende Nomor 384 Tahun 2012 tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah Ende Kabupaten Ende Sebagai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)
Tanggal Penetapan BLUD	27-Nov-12

### 2. Layanan

Jenis pelayanan kesehatan yang diberikan RSUD Ende adalah:

- 1) Instalasi Rawat Jalan: Poliklinik Penyakit Dalam; Poliklinik Anak; Poliklinik Bedah; Poliklinik Kebidanan dan Kandungan; Poliklinik Mata; Poliklinik Telinga, Hidung, dan Tenggorokan (THT); Poliklinik Fisioterapi; Poliklinik Syaraf; Poliklinik Gigi dan Mulut; Poliklinik VCT; Poliklinik Kulit Kelamin; Poliklinik TB Dost; Poliklinik Psikologi; dan Poliklinik Jiwa.
- 2) Instalasi Rawat Inap: Penyakit Dalam; Anak; Bedah; Nifas; Perinatal; Paviliun; ICU; dan Khusus
- 3) Instalasi Farmasi;
- 4) Instalasi Bedah Sentral;
- 5) Instalasi Patologi Klinik (Laboratorium);
- 6) Instalasi Radiologi;
- 7) Instalasi Gizi;
- 8) Instalasi Pemulasaran Jenazah;
- 9) Instalasi Gawat Darurat;
- 10) Bank Darah Rumah Sakit.

## O. UPTD PENGELOLAAN ALAT BERAT KABUPATEN KUPANG

### 1. Profil Umum

Profil Umum	
Informasi Umum	
Nama BLUD	UPTD Pengelolaan Alat Berat Kabupaten Kupang
Alamat	Jalan Piet A. Tallo No. 1 Bundaran PU Oesapa Kupang, Nusa Tenggara Timur
Pemimpin	Mateldius S.J. Sanam, ST, Kepala UPTD
Jenis Layanan BLUD	Sewa Alat Berat
Informasi BLUD	
Pembina Teknis BLUD	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kupang
Pembina Keuangan BLUD	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kupang
Penetapan sebagai BLUD	Keputusan Bupati Kupang Nomor 245/KEP/HK/2017 tentang Penetapan Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah UPTD Pengelolaan Alat Berat
Tanggal Penetapan BLUD	01 Agustus 2017

### 2. Layanan

UPTD Pengelolaan Alat Berat Kabupaten Kupang menyediakan pelayanan persewaan alat berat antara lain dump truck, tronton, wheel loader, bulldozer, motor grader, vibrator roller, track type tractors, hydraulic excavator, dan vibrator soil compactor. Wilayah pelayanannya mencakup Kabupaten Kupang dan sekitarnya yang terdiri dari 24 kecamatan yaitu Semau, Semau Selatan, Kupang Barat, Nekamese, Amarasi Barat, Taebenu, Kupang Tengah, Kupang Timur, Amarasi, Amarasi Selatan, Amarasi Timur, Amabi Oefeto, Amabi Oefeto Timur, Fatuleu, Fatuleu Tengah, Fatuleu Barat, Sulamu, Takari, Amfoang Barat Daya, Amfoang Barat Laut, Amfoang Tengah, Amfoang Utara, Amfoang Selatan, dan Amfoang Timur.

## P. UPTD RSUD BORONG

### 1. Profil Umum

Profil Umum	
Informasi Umum	
Nama BLUD	UPTD RSUD Borong Kabupaten Manggarai Timur
Alamat	Lehong, Desa Gurung Liwut, Kecamatan Borong, Kab. Manggarai Timur, Nusa Tenggara Timur
Pemimpin	dr. Emilia Hernawati Yorini Dorsi, Direktur
Jenis Layanan BLUD	Kesehatan
Informasi Lainnya	RSUD Borong mendapat Ijin Operasional dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) tanggal 24 Juni 2020 dengan Nomor DPMPTSP.576/01/IOP-RSUD/VI/2020 dan diresmikan oleh Bupati Manggarai Timur pada tanggal 17 Juli 2020
Informasi BLUD	
Pembina Teknis BLUD	Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Timur
Pembina Keuangan BLUD	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Manggarai Timur
Penetapan sebagai BLUD	Keputusan Bupati Manggarai Timur Nomor HK/35/Tahun 2022 tanggal 09 Februari 2022 tentang Penerapan Badan Layanan Umum Daerah Pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Boron
Tanggal Penetapan BLUD	02 Februari 2022

### 2. Layanan

Jenis pelayanan kesehatan yang diberikan RSUD Borong adalah:

- 1) Pelayanan Rawat Jalan o Poliklinik Kebidanan dan Penyakit Kandungan;
  - o Poliklinik Penyakit Dalam dan Umum;
  - o Poliklinik Bedah;
  - o Poliklinik Kesehatan Gigi dan Mulut
- 2) Pelayanan Gawat Darurat
- 3) Pelayanan Rawat Inap
- 4) Pelayanan Operasi (Pembedahan)
- 5) Pelayanan Intensif (ICU)
- 6) Pelayanan Rujukan
- 7) Pelayanan Laboratorium
- 8) Pelayanan Radiologi
- 9) Pelayanan Rekam Medik
- 10) Pelayanan Ambulance
- 11) Pelayanan Transfusi dan Bank Darah
- 12) Pelayanan Gizi

## Q. SPAM KABUPATEN NAGEKEO

### 1. Profil Umum

Profil Umum	
Informasi Umum	
Nama BLUD	SPAM Kabupaten Nagekeo
Alamat	Jalan Jenderal Soeharto, Kelurahan Danga, Kec. Aesesa, Kab. Nagekeo, Nusa Tenggara Timur
Pemimpin	Robertus Rena, S.T., Kepala BLUD SPAM Kabupaten Nagekeo
Jenis Layanan BLUD	Penyediaan Layanan Air Minum
Informasi BLUD	
Pembina Teknis BLUD	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Nagekeo
Pembina Keuangan BLUD	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nagekeo
Penetapan sebagai BLUD	Keputusan Bupati Nagekeo Nomor 249/KEP.HK/2011 tentang Persetujuan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Sistem Penyediaan Air Minum (PPK-BLUD SPAM) pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nagekeo
Tanggal Penetapan BLUD	04 Oktober 2011

### 2. Layanan

Kegiatan utama BLUD SPAM Kabupaten Nagekeo adalah usaha pemenuhan kebutuhan air minum bagi masyarakat yang meliputi pelayanan air minum melalui pendaftaran menjadi pelanggan dengan pemasangan meteran dan jaringan perpipaan; pelayanan penjualan air dengan mobil tanki; pelayanan pindah jalur pemasangan kembali meteran air; pelayanan ganti nama pemilik meteran; pelayanan pindah lokasi meteran air; dan pelayanan gangguan jaringan distribusi.

Pelayanan BLUD SPAM Nagekeo sampai saat ini baru menjangkau empat kecamatan, yaitu Kecamatan Aesesa sebagai kantor pusat pelayanan, IKK Mauponggo, IKK Boawae dan IKK Nangaroro dengan gambaran sebagai berikut:

- 1) Kecamatan Aesesa, dengan sumber air dari air permukaan dan mata air melayani sebanyak 2.358 pelanggan.
- 2) IKK Mauponggo, dengan sumber air dari mata air melayani sebanyak 165 pelanggan.
- 3) IKK Boawae, dengan sumber air dari mata air melayani sebanyak 904 pelanggan.
- 4) IKK Nangaroro, dengan sumber air dari mata air melayani sebanyak 536 pelanggan.

## R. RSUD AERAMO

### 1. Profil Umum

Profil Umum	
Informasi Umum	
Nama BLUD	RSUD Aeramo
Alamat	Jalan Prof. W.Z. Yohanes, Kelurahan Aeramo, Kec. Aesesa, Kab. Nagekeo, Nusa Tenggara Timur
Pemimpin	dr. Chandrawati, Direktur
Jenis Layanan BLUD	Kesehatan
Informasi BLUD	
Pembina Teknis BLUD	Dinas Kesehatan Kabupaten Nagekeo
Pembina Keuangan BLUD	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nagekeo
Penetapan sebagai BLUD	Keputusan Bupati Nagekeo Nomor 168/KEP/HK/2020 tentang Penetapan Penerapan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Daerah Aeramo Kabupaten Nagekeo
Tanggal Penetapan BLUD	5 Maret 2020

### 2. Layanan

Dalam melaksanakan tugasnya, RSUD Aeramo membentuk unit pelayanan yang membawahi semua ruangan/instalasi dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Pelayanan Gawat Darurat.
- 2) Pelayanan Rawat Jalan yang terdiri dari: poli Penyakit Dalam; poli Kebidanan dan Kandungan; poli Bedah; poli Anak; poli Mata; poli Jiwa; poli Umum; poli Saraf; poli TB; poli Gigi; dan poli VCT.
- 3) Pelayanan Rawat Inap meliputi: Rawat Inap Umum; Rawat Inap Kebidanan dan Kandungan; Rawat Inap Intensif; dan Rawat Inap Perinatologi.
- 4) Pelayanan Bedah Central
- 5) Pelayanan Persalinan
- 6) Pelayanan Rehabilitasi Medik
- 7) Pelayanan Laboratorium; Pelayanan Radiologi; Pelayanan Rekam Medik
- 8) Pelayanan Farmasi; Pelayanan Gizi
- 9) Pelayanan Administrasi
- 10) Pelayanan Ambulance dan Mobil Jenazah; Pelayanan Pemulasaran Jenazah
- 11) Pelayanan Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI)



## S. RSUPP BETUN

### 1. Profil Umum

Profil Umum	
Informasi Umum	
Nama BLUD	RSUPP Betun
Alamat	Jl. Sukabihanawa, Desa Kamanasa, Kec. Malaka Tengah
Pemimpin	dr. Wayan Megaputra Supancanata, Direktur
Jenis Layanan BLUD	Kesehatan
Informasi BLUD	
Pembina Teknis BLUD	Dinas Kesehatan Kabupaten Malaka
Pembina Keuangan BLUD	Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Malaka
Penetapan sebagai BLUD	Keputusan Bupati Malaka Nomor 78/HK/2018 tentang Pelaksanaan Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah di Rumah Sakit Umum Penyangga Perbatasan Betun Kabupaten Malaka Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tanggal Penetapan BLUD	13 Februari 2018

## **BAB IV**

### **GAMBARAN KEGIATAN BIRO PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN**

#### **4.1 UMUM**

##### **1. Visi dan Misi**

###### **a. Visi**

Visi Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Nusa Tenggara Timur  
2005-2025 yaitu :

“NUSA TENGGARA TIMUR YANG MAJU, MANDIRI, ADIL DAN MAKMUR  
DALAM BINGKAI NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA”

###### **b. Misi**

Untuk mencapai Visi Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Nusa  
Tenggara Timur 2005-2025, maka Misi pembangunan selama periode  
tersebut adalah :

1. Mewujudkan masyarakat Nusa Tenggara Timur yang bermoral, beretika, berbudaya dan beradab berdasarkan falsafah Pancasila.
2. Mewujudkan manusia Nusa Tenggara Timur yang berkualitas dan berdaya saing global.
3. Mewujudkan masyarakat Nusa Tenggara Timur yang demokratis berlandaskan hukum.
4. Mewujudkan Nusa Tenggara Timur sebagai wilayah yang berketahanan ekonomi, sosial budaya, politik dan keamanan.
5. Mewujudkan Nusa Tenggara Timur sebagai wilayah yang memiliki keseimbangan dalam pengelolaan lingkungan.
6. Mewujudkan posisi dan peran Nusa Tenggara Timur dalam pergaulan antar negara, daerah dan masyarakat.
7. Mewujudkan Nusa Tenggara Timur sebagai provinsi kepulauan dan masyarakat maritim.

## **2. Tugas, Pokok dan Fungsi (Tupoksi)**

### **a. Organisasi Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan**

Mempunyai tugas membantu Asisten Perekonomian dan Pembangunan dalam penyiapan perumusan kebijakan Daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang kebijakan perekonomian dan sumber daya alam, badan usaha milik daerah dan badan layanan umum daerah serta administrasi pembangunan.

Dalam melaksanakan tugas Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan perumusan kebijakan Daerah di bidang kebijakan perekonomian dan sumber daya alam, badan usaha milik daerah dan badan layanan umum daerah serta administrasi pembangunan;
- b. Penyiapan pengoordinasian perumusan kebijakan di bidang kebijakan perekonomian dan sumber daya alam, badan usaha milik daerah dan badan layanan umum daerah serta administrasi pembangunan;
- c. Penyiapan pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat Daerah di bidang kebijakan perekonomian dan sumber daya alam, badan usaha milik daerah dan badan layanan umum daerah serta administrasi pembangunan;
- d. Penyiapan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang kebijakan perekonomian dan sumber daya alam, badan usaha milik daerah dan badan layanan umum daerah serta administrasi pembangunan;
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan.

**Rincian Tugas Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan :**

1. Meningkatkan koordinasi penyusunan kebijakan pemerintah daerah di bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Pembinaan BUMD dan BLUD serta Administrasi Pembangunan;
2. Meningkatkan pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintah di bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Pembinaan BUMD dan BLUD serta Administrasi Pembangunan;
3. Meningkatkan kualitas tata kelola administrasi pembangunan daerah (APBD) dan administrasi pembangunan wilayah (APBN), dalam rangka mewujudkan pembangunan yang tertib, cepat dan tepat.

**b. Organisasi Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan**

Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan mempunyai perangkat organisasi sebagai berikut :

1. Jabatan Struktural :
  - 1.1. Kepala Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan
  - 1.2. Kepala Sub Tata Usaha.
2. Analisis Kebijakan Ahli Madya
3. Analisis Kebijakan Ahli Muda
4. Pranata Komputer Ahli Pertama
5. Pelaksana

Total jabatan struktural dan fungsional yang terisi pada Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan sebanyak 6 (Enam), terdiri dari 2 (dua) jabatan struktural dan 3 (Tiga) jabatan fungsional dan 1 (Satu ) Pelaksana dengan rincian sebagai berikut :

- Eselon II : 1 orang
- Eselon IV : 1 orang
- Analis Ahli Madya : 3 orang
- Analis Ahli Muda : 6 orang
- Pranata Komputer Ahli pertama : 4 orang
- Pelaksana : 24 orang

Rekapitulasi Pegawai Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan  
Provinsi Nusa Tenggara Timur

a. Kekuatan Pegawai (Bazzeting) : 38 orang

No	Pegawai	Jumlah (orang)	Jenis Kelamin	
			L	P
1	PNS	36	15	21
2	CPNS	0	0	0
3	Tenaga Kontrak	2	1	1
<b>Jumlah</b>		<b>38</b>	<b>16</b>	<b>22</b>

b. Klasifikasi PNS/CPNS

1. Jumlah PNS/CPNS Menurut Golongan :

No	Golongan	Jumlah (orang)	Jenis Kelamin	
			L	P
1	Golongan IV	6	4	2
2	Golongan III	26	8	18
3	Golongan II	4	3	1
4	Golongan I	0	0	0
<b>Jumlah</b>		<b>36</b>	<b>15</b>	<b>21</b>

2. Jumlah Pejabat Struktural / Fungsional :

No	Jabatan	Jumlah (orang)	Jenis Kelamin	
			L	P
1	Pejabat Eselon II-A	0	0	0
2	Pejabat Eselon III-A	0	0	0
3	Pejabat Eselon IV-A	1	0	1
4	Pejabat Fungsional	13	5	8
<b>Jumlah</b>		<b>14</b>	<b>5</b>	<b>9</b>

3. Jumlah PNS/CPNS menurut Tingkat Pendidikan :

No	Jenjang Pendidikan	Jumlah (orang)	Jenis Kelamin	
			L	P
1	Doktor (S-3)	0	0	0
2	Magister (S-2)	8	6	2
3	Sarjana (S-1)	21	5	16
4	Diploma III (D-III)	0	0	0
5	SLTA/SMK	7	4	3
6	SLTP	0	0	0
7	SD	0	0	0
<b>Jumlah</b>		<b>36</b>	<b>15</b>	<b>21</b>

4. Jumlah Tenaga Kontrak menurut Fungsi dan Tugas

No	Fungsi	Jumlah (orang)	Jenis Kelamin	
			L	P
1	Satpam	0	0	0
2	Cleaning service	0	0	0
3	Sopir	1	1	0
4	Pengadministrasi Umum	1	0	1
Jumlah		2	1	1

## PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2024

Tahun 2024		Keterangan
Program dan Kegiatan	Jumlah Anggaran (Rp.)	
<b>BIRO PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN</b>	Rp1.358.415.064,00	Data bulan Juli
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI</b>	Rp385.079.640,00	
<b>1. Kegiatan Perencanaan Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja</b>	Rp27.139.000,00	
a. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp27.139.000,00	
<b>2. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Rp183.568.000,00	
a. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp45.600.000,00	
b. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Rp5.000.000,00	
c. Penyediaan Bahan Material	Rp48.894.000,00	
d. Fasilitas Kunjungan Tamu	Rp45.000.000,00	
e. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp39.074.000,00	
<b>3. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	Rp100.585.040,00	
a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp1.310.000,00	
b. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp99.275.040,00	



Tahun 2024		Keterangan
Program dan Kegiatan	Jumlah Anggaran (Rp.)	
<b>4. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	Rp73.787.600,00	
a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan	Rp56.997.600,00	
b. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp16.790.000,00	
<b>PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN</b>	Rp759.600.000,00	
<b>1. Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian</b>	Rp408.000.000,00	
a. Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro	Rp382.900.000,00	
b. Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro	Rp25.100.000,00	
<b>2. Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam</b>	Rp109.100.000,00	
a. Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kegiatan Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	Rp69.100.000,00	
b. Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Rp40.000.000,00	
<b>3. Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD</b>	Rp242.500.000,00	
a. Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	Rp156.000.000,00	
a. Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BLUD	Rp86.500.000,00	

Tahun 2024		Keterangan
Program dan Kegiatan	Jumlah Anggaran (Rp.)	
<b>PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN</b>	Rp213.735.424,00	
<b>1. Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah</b>	Rp187.160.000,00	
a. Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD	Rp99.000.000,00	
b. Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN	Rp39.660.000,00	
c. Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah	Rp48.500.000,00	
<b>2. Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah</b>	Rp26.575.424,00	
a. Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan APBD	Rp26.575.424,00	

#### 4.2 Produk Hukum yang dihasilkan

NO	URAIAN	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024
A.	PERATURAN GUBERNUR (PERGUB)	1. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur No. 26 Tahun 2021 Tentang Sentra Pengembangan Bambu	1. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur No. 117 Tahun 2022 Tentang Sentra Pengembangan Jambu Mete	1. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur No. 24 Tahun 2023 Tentang Sinkronisasi dan Harmonisasi Pembangunan Daerah dan Pembangunan Wilayah	1. Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur No. 263/KEP/HK/2024 Tentang Gugus Tugas Percepatan Pemanfaatan Digitalisasi Pertanian Dalam Mendukung Ketahanan Pangan Dan Penanganan Inflasi Provinsi Nusa Tenggara Timur
B.	KEPUTUSAN GUBERNUR		2. Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur No. 20/KEP/HK/2022 Tentang Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2022  3. Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur No. 59/KEP/HK/2022 Tentang Kelompok Kerja Pengelolaan Hasil Hutan Bukan Kayu Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2022	2. Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur No. 45/KEP/HK/2023 Tentang Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur 2023  3. Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur No. 80/KEP/HK/2023 Tentang Kelompok Kerja Pengelolaan Hasil Hutan Bukan Kayu Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023	2. Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur No. 75/KEP/HK/2024 Tentang Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur 2024